

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI DI
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024**

(Skripsi)

Oleh

**BETRIS OKTARINI ARISTA
NPM. 2216041140**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI DI
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024**

**Oleh
BETRIS OKTARINI ARISTA**

**Skripsi
Sebagai Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

**Pada
Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI DI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

Oleh

BETRIS OKTARINI ARISTA

Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik antara Bappeda dan Balitbangda provinsi lampung. Permasalahan utamanya terletak pada perbedaan tingkat keberhasilan pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Bappeda dan Balitbangda serta menganalisis aspek aspek yang mempengaruhi perbedaan tersebut dengan menggunakan teori De Coning *et al.* (2018) yang mencakup tujuh aspek: *content, context, commitment, capacity, clients and coalitions, communication, serta coordination*. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kualitatif untuk menganalisis implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di bappeda dan balitbangda provinsi lampung. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dianalisis dengan model miles, huberman, serta divalidasi melalui triangulasi sumber. hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di bappeda provinsi lampung lebih unggul dalam pemahaman isi kebijakan, kapasitas sdm, koordinasi, serta komitmen para pelaksana, namun masih perlu memperkuat mekanisme umpan balik dan komunikasi dua arah. Sementara di balitbangda cukup efektif dalam pelayanan langsung dan dedikasi pelaksana, tetapi masih lemah pada pembaruan data digital, kolaborasi eksternal, serta koordinasi berkelanjutan. Bappeda disarankan memperkuat inovasi digital dan kolaborasi eksternal, sedangkan balitbangda perlu meningkatkan kompetensi teknis, pembaruan data, serta sistem koordinasi antarbidang agar lebih informatif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Keterbukaan Informasi Publik, Implementasi Kebijakan, *Good Governance*

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE POLICY IN REGIONAL GOVERNMENT AGENCIES OF LAMPUNG PROVINCE IN 2024

By

BETRIS OKTARINI ARISTA

This study discusses the implementation of the Public Information Disclosure Policy between the Regional Development Planning Agency Bappeda and the Research and Development Agency Balitbangda of Lampung Province. The main problem lies in the difference in the level of success in implementing public information disclosure. This study aims to identify how the policy is implemented in both agencies and to analyze the aspects influencing those differences using the theory of De Coning et al. (2018), which includes seven aspects: content, context, commitment, capacity, clients and coalitions, communication, and coordination. A qualitative case study approach was employed to analyze the implementation process. Data were collected through observation, interviews, and documentation, analyzed using the Miles and Huberman model, and validated through source triangulation. The findings indicate that Bappeda performs better in terms of policy comprehension, human resource capacity, coordination, and commitment, yet needs to strengthen feedback mechanisms and two-way communication. Meanwhile, Balitbangda is relatively effective in direct service and staff dedication but remains weak in data updating, external collaboration, and sustainable coordination. It is recommended that Bappeda enhance digital innovation and external collaboration, while Balitbangda should improve technical competence, data management, and interdepartmental coordination to become more informative and sustainable.

Keywords: Public Information Disclosure, Policy Implementation, Good Governance

Judul Skripsi

: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
KETERBUKAAN INFORMASI DI ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024

Nama Mahasiswa

: *Betris Oktarini Arista*

Nomor Pokok Mahasiswa : 2216041140

Program Studi

: Ilmu Administrasi Negara

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Devi Yulianti, S.A.N., MA., Ph.D
NIP. 198507052008122004

Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si
NIP. 198807122019031012

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si
NIP. 19790914 2000604 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

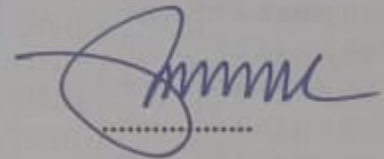
Ketua : Devi Yulianti, S.A.N., MA., Ph.D



Sekretaris : Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si



Penguji : Dr. Dedy Hermawan, S. Sos., M. Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S. Sos., M. Si.

NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 23 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 23 Januari 2026
Yang membuat pernyataan,



Betris Oktarini Arista
NPM. 2216041140

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Betris Oktarini Arista. Penulis merupakan anak ke dua dari dua bersaudara, Riwayat pendidikan penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak Al-Anshor Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2010, Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 3 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2016. Pendidikan kemudian dilanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 28 Bandar Lampung yang selesai pada tahun 2019. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas Negeri 14 Bandar Lampung yang selesai pada tahun 2022, setelah menamatkan pendidikan di tingkat SMA, penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2022. Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis aktif dalam organisasi kemahasiswaan, yaitu Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA) sebagai anggota Bidang Rumah Tangga Organisasi. Penulis melaksanakan Program Kuliah Kerja Nyata di Kabupaten Lampung selatan. Selanjutnya, pada bulan Juli hingga Agustus 2025 penulis mengikuti Praktik Kerja Lapangan di Bappeda Provinsi Lampung.

MOTTO

”Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu”

(Ali bin Abi Thalib)

“Kita sering takut memilih, padahal diam pun menagih harga. Jika semua jalan beresiko, maka melangkahlah, setidaknya luka itu berasal dari keberanian, bukan dari penyesalan”

(Zia)

“Hidup bakal terus berjalan, mau kamu jatuh, hancur, atau kehilangan arah, dunia nggak akan berhenti nunggu kamu pulih. kamu cuma punya dua pilihan tenggelam dalam sedih, atau berdiri lagi dan lanjut jalan sampai garis akhir”

(Penulis)

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil‘alamin. Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala atas limpahan rahmat, hidayah, serta ridho-Nya. Berkat izin-Nya, doa dan restu orang tua, serta dukungan berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi di Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (S.A.N.) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini banyak tantangan, keterbatasan, serta hambatan yang harus dihadapi. Namun, dengan bantuan, bimbingan, motivasi, dan doa dari berbagai pihak, seluruh proses tersebut dapat dilalui dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibunda tercinta , sosok ibu sekaligus wanita terhebat dalam hidup penulis. Terima kasih atas cinta yang tulus, doa yang tak pernah putus, perhatian yang tak pernah lelah, serta pengorbanan yang tidak terhitung nilainya. Mama selalu menjadi alasan utama penulis untuk terus berjuang dan menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Mohon maaf apabila hingga saat ini penulis belum sepenuhnya mampu membalas semua pengorbanan dan belum sepenuhnya membanggakan. Semoga mama senantiasa diberikan kesehatan dan umur panjang untuk menemani setiap proses pendewasaan penulis.
2. Ayahanda tercinta, sosok ayah yang senantiasa menjadi teladan, pelindung, dan sumber kekuatan bagi penulis. Terima kasih atas kasih sayang, doa, nasihat, serta kerja keras yang tidak pernah henti diberikan demi kelancaran pendidikan dan masa depan penulis. Dukungan ayah, baik secara moral

maupun material, menjadi penyemangat utama bagi penulis dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini. Semoga ayah senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat terus mendampingi setiap langkah perjalanan hidup penulis.

3. Saudari perempuan saya tercinta, Terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dukungan moral maupun material, nasihat, serta doa yang senantiasa diberikan sejak penulis lahir hingga saat ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan agar dapat menyaksikan keberhasilan adik bungsu di masa mendatang.
4. Mrs Devi Yulianti S.A.N., M.A., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Utama penulis. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, arahan, saran, motivasi, serta waktu yang telah Ibu dedikasikan selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis merasa sangat terhormat dapat belajar langsung di bawah bimbingan Ibu. Segala diskusi dan ilmu yang Ibu bagikan bukan hanya sekadar membantu penulis menyelesaikan tugas akhir, melainkan juga telah membuka pola pikir penulis dan memberikan inspirasi tentang bagaimana menjadi seorang akademisi. Terima kasih pula atas kesabaran dan dukungan moral yang senantiasa Ibu berikan. Semoga segala kebaikan, ilmu, dan waktu yang telah Ibu berikan menjadi amal jariyah yang tak terputus. Semoga Ibu senantiasa diberikan keberkahan hidup serta kebahagiaan lahir dan batin dalam mengabdikan ilmu bagi dunia pendidikan.
5. Bapak Dodi S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing kedua sekaligus Dosen Pembimbing Akademik penulis. Terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan atas segala waktu, ilmu, dan kesabaran yang telah Bapak curahkan dalam membimbing penulis. Sejak awal masa perkuliahan hingga tahap akhir penyusunan skripsi ini, Bapak telah menjadi sosok mentor yang luar biasa dalam memberikan arahan, kritik yang membangun, serta motivasi. Penulis merasa sangat beruntung dan bersyukur atas segala kemudahan, bantuan, serta nasihat bijak yang Bapak berikan, terutama di saat penulis menghadapi titik terendah dan berbagai kendala akademik

Penulis berterimakasih juga atas keikhlasan Bapak untuk tetap memberikan arahan di tengah kesibukan Bapak, serta kerelaan Bapak untuk senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis. Semoga segala kebaikan, ketulusan, dan setiap butir ilmu yang Bapak bagikan dengan penuh keikhlasan menjadi amal jariyah yang pahalanya terus mengalir tiada putus. Penulis senantiasa berdoa agar Bapak diberikan kesehatan yang sempurna, umur yang berkah, kemudahan dalam segala urusan, serta kebahagiaan yang melimpah bersama keluarga tercinta. Terima kasih Bapak Dodi, telah menjadi cahaya penyemangat dan bagian terpenting dalam keberhasilan penulis meraih gelar ini.

6. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S. Sos., M.Si., selaku Dosen Penguji Skripsi. Terima kasih banyak atas segala kritik, saran, serta masukan yang sangat membangun sejak masa seminar proposal hingga skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan. Penulis merasa sangat terhormat sekaligus bersyukur mendapatkan kesempatan untuk diuji oleh Bapak. Saran dan pandangan-pandangan baru yang Bapak berikan sangatlah penting dalam menutup celah-celah kekurangan yang ada. Semoga segala ilmu, kebaikan, dan ketulusan Bapak dapat menjadi ladang amal yang terus mengalir. Sehingga mendapatkan keberkahan dalam setiap langkah, serta kesuksesan yang semakin gemilang dalam karier maupun kehidupan pribadi.
7. Prof Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
8. Ibu Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
9. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung, terima kasih atas ilmu pengetahuan, pengalaman, dan dedikasi yang telah diberikan. Mohon maaf apabila penulis pernah melakukan kesalahan selama menempuh pendidikan.
10. Rasa terima kasih juga saya sampaikan kepada Nizam dan Nadhif. Terima kasih telah menjadi sinar matahari yang selalu hangat menyinari hari-hari

paling mendung selama proses penyusunan tugas akhir ini. Kehadiran kalian dengan segala tingkah lucu dan tawa yang hadir tanpa sebab adalah penawar lelah yang paling mujarab bagi saya. Terima kasih telah mengajarkan saya arti kebahagiaan sederhana. Melalui kalian, saya belajar bahwa sesulit apa pun dunia luar, selalu ada alasan untuk pulang dan tertawa kembali.

11. Penulis secara khusus menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Aprilia Friska Dika Lesmana, sebagai teman seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan bantuan yang diberikan sejak awal proses penyusunan hingga tahap akhir. Diskusi, saling berbagi informasi, serta semangat yang terus diberikan di tengah berbagai kesulitan dan keterbatasan waktu menjadi bagian penting dalam perjalanan penyelesaian skripsi ini. Kehadiran sebagai sahabat yang selalu siap mendengarkan keluh kesah, memberi masukan, dan saling menguatkan menjadikan proses yang berat terasa lebih ringan untuk dijalani. Penulis menyadari bahwa tanpa kebersamaan dan perjuangan yang dilalui bersama, penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.
12. Sahabat seperjuangan sejak mahasiswa baru Erni, Sasa, dan Cerli. Terima kasih atas kebersamaan, interaksi, serta dukungan yang diberikan selama menjalani proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan kebersamaan selama menempuh pendidikan di bangku kuliah turut memberikan pengalaman dan kenangan yang berarti bagi penulis. Semoga ikatan persahabatan ini tetap terjalin erat meskipun kita akan menempuh jalan perjuangan masing-masing setelah kelulusan ini
13. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Reg D, khususnya Alvin, Aldi, Feri, dan Aqmal, yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses penyusunan skripsi. Terima kasih atas kesediaan menemani penulis pada saat seminar proposal dan seminar hasil hingga larut malam, membantu dalam pendokumentasian, serta memberikan semangat dan kebersamaan yang sangat berarti. Dukungan

tersebut memberikan dorongan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

14. Teman-teman KKN Desa Banding, Terima kasih atas kebersamaan, cerita, dan pengalaman berharga selama pengabdian
15. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang telah memberikan kesempatan belajar dan pengalaman berharga. Secara khusus, penulis menyampaikan terima kasih kepada jajaran Bagian Umum dan Kepegawaian atas bimbingan, arahan, serta sikap terbuka dan ramah yang diberikan selama pelaksanaan PKL. Pengalaman berinteraksi dan bekerja di lingkungan tersebut tidak hanya menambah pemahaman penulis mengenai dunia kerja dan pemerintahan, tetapi juga menjadi pengalaman hidup yang bermakna dan berkesan.
16. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Balitbangda yang telah memberikan izin dan menerima penulis untuk melaksanakan penelitian, serta atas sikap terbuka dan kerja sama yang diberikan selama proses penelitian berlangsung.
17. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas segala bantuan dan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.
18. Untuk diriku sendiri, Betris Oktarini Arista. Skripsi ini adalah saksi bisu atas segala perang batin yang kau menangkan sendirian. Ada saat-saat di mana kau merasa ditinggalkan, tidak dimengerti, dan ingin meninggalkan segalanya. Namun, di antara sisa-sisa harapan yang hampir padam, kau memilih untuk percaya pada keajaiban doa. Terima kasih telah menjadi pahlawan bagi dirimu sendiri.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR SINGKATAN.....	iv
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Penelitian Terdahulu.....	15
2.2 Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan.....	17
2.2.1 Definisi Implementasi Kebijakan.....	17
2.2.2 Efektivitas Implementasi Kebijakan	17
2.3.1 Definisi <i>Good governance</i>	27
2.4 Kerangka Pikir	29
III METODE PENELITIAN	31
3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian	31
3.2 Fokus Penelitian	32
3.3 Lokasi Penelitian.....	33
3.4 Jenis dan Sumber Data	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data	34
3.6 Teknik Analisis Data.....	39
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	40

IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
4.2 Hasil Penelitian	50
4.2.1 Implementasi KIP di Bappeda Provinsi Lampung.....	51
4.2.2 Implementasi KIP di Balitbangda Provinsi Lampung.....	93
4.2.3 Aspek yang Membedakan Keberhasilan Implementasi KIP di.....	123
Bappeda dan Balitbangda Provinsi Lampung	
4.2.4 Tabel Hasil Penelitian KIP di Bappeda dan Balitbangda	129
Provinsi Lampung	
4.3 Pembahasan.....	134
4.3.1 Implementasi KIP di Bappeda dan Balitbangda Provinsi Lampung..	135
4.3.1.1 <i>Content</i>	135
4.3.1.2 <i>Context</i>	138
4.3.1.3 <i>Commitment</i>	145
4.3.1.4 <i>Capacity</i>	149
4.3.1.5 <i>Clients&Coalitions</i>	153
4.3.1.6 <i>Communication</i>	157
4.3.1.7 <i>Coordination</i>	161
4.3.2 Aspek yang Membedakan Keberhasilan Implementasi KIP di.....	165
Bappeda dan Balitbangda Provinsi Lampung	
V KESIMPULAN DAN SARAN	170
5.1 Kesimpulan	170
5.2 Saran.....	171
DAFTAR PUSTAKA.....	174

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Kategori KIP OPD dan Instansi Vertikal	5
Tabel 2. Kajian Penelitian Terdahulu	15
Tabel 3. Data Informan Penelitian Bappeda Provinsi Lampung.....	36
Tabel 4. Data Informan Penelitian Ba litbangda Provinsi Lampung	37
Tabel 5. Dokumentasi Penelitian Bappeda dan Balitbangda Provinsi	38
Lampung	
Tabel 6. Tabel Hasil Penelitian Implementasi KIP di Bappeda dan.....	129
Balitbangda Provinsi Lampung	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Peta Sebaran Indeks KIP 2024	3
Gambar 2. Penerimaan Penghargaan Badan Publik Informatif Dalam..... Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024	4
Gambar 3. Tampilan <i>Website</i> Bappeda Provinsi Lampung	7
Gambar 4. Tampilan <i>Website</i> Balitbangda Provinsi Lampung.....	9
Gambar 5. Kerangka Pikir.....	29
Gambar 6. Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Lampung	44
Gambar 7. Struktur Organisasi Balitbangda Provinsi Lampung.....	47
Gambar 8. Website Bappeda Provinsi Lampung	59
Gambar 9. Website Balitbangda Provinsi Lampung	117

DAFTAR SINGKATAN

Bappeda	: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Balitbangda	: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
DIP	: Daftar Informasi Publik
E-MONEV	: <i>Electronic Monitoring and Evaluation</i>
IKIP	: Indeks Keterbukaan Informasi Publik
KIP	: Keterbukaan Informasi Publik
KI	: Komisi Informasi
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PPID	: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
RPJPD	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RKPD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
SAQ	: <i>Self Assessment Questionnaire</i>
SKM	: Survei Kepuasan Masyarakat
SOP	: Standar Operasional Prosedur
UU	: Undang-Undang

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan memaparkan latar belakang dari topik penelitian yang berkaitan dengan implementasi KIP, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Bagian ini menjadi dasar penting untuk memahami alasan dan tujuan penelitian dilakukan.

1.1 Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban bagi sebuah negara demokratis yang secara sungguh-sungguh menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Komitmen terhadap prinsip ini di Indonesia diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini secara tegas menggariskan bahwa setiap lembaga pemerintah tanpa terkecuali memiliki kewajiban hukum untuk menyediakan informasi yang jelas, lengkap, dan transparan kepada masyarakat. Melalui akses informasi, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih baik, menuntut pertanggungjawaban, dan menjadi mitra aktif pemerintah dalam mewujudkan kemajuan bersama (Yuono, 2023). Ketika informasi dapat diakses secara mudah, masyarakat memiliki kontribusi untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan kebijakan, memberikan masukan, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap setiap langkah dan keputusan yang diambil oleh penyelenggara negara. Ini secara langsung berkontribusi pada penciptaan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Good governance menjadi prinsip dasar yang menentukan arah dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Di dalamnya, terdapat prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, efektivitas, serta keadilan sosial yang harus dijalankan secara harmonis (Wibawa, 2019). Menurut UNDP, prinsip-prinsip *good governance* mencakup berbagai aspek penting mulai dari keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan, penegakan hukum yang adil, keterbukaan dalam

setiap proses, hingga tanggung jawab moral dalam penggunaan wewenang (Fadila & Ariany, 2022).

Salah satu strategi untuk mendorong terwujudnya tata kelola yang transparan adalah melalui implementasi Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan informasi bukan hanya mengenai transparansi administratif, tetapi juga sarana untuk memperkuat peran masyarakat sebagai subjek pembangunan yang kritis dan aktif (Lubis, Kusumasari, & Hakim, 2018). Dengan adanya akses informasi yang terbuka, masyarakat memiliki peluang untuk terlibat dalam pengawasan anggaran, memantau pelaksanaan kebijakan, serta memberikan masukan atas berbagai layanan publik. Hal ini memperkuat legitimasi demokrasi dan memperkecil peluang penyimpangan kekuasaan (Fadila & Ariany, 2022). Meskipun landasan hukumnya sudah sangat jelas kenyataannya implementasi KIP di berbagai instansi publik masih menghadapi sejumlah kendala serius. Ini bukan sekadar hambatan kecil, melainkan tantangan signifikan yang menghambat terwujudnya tujuan KIP.

Tantangan utama dalam menjalankan implementasi KIP masih sering muncul dengan permasalahan yang kompleks dan saling berkaitan. Pertama, ada keterbatasan infrastruktur teknologi yang tidak memadai, banyak instansi masih belum memiliki sistem atau sarana digital yang canggih dan terintegrasi untuk mengelola serta menyebarkan informasi secara efektif. Hal ini berarti masih ada instansi yang memproses manual yang lambat atau bahkan ketiadaan platform yang mudah diakses oleh publik. Kedua, minimnya ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih di bidang pengelolaan informasi publik, banyak petugas yang tidak dibekali pengetahuan dan keterampilan memadai tentang tata kelola informasi, mulai dari pengumpulan, pengolahan, hingga penyajian, hal ini tentu akan menghambat kinerja KIP secara keseluruhan. Ketiga, dan mungkin yang paling parah yaitu masih kuatnya budaya birokrasi yang belum sepenuhnya terbuka (Mujiburrahman, Suryadi, & Budhi, 2019). Kondisi-kondisi ini secara langsung berdampak negatif pada akses masyarakat terhadap informasi. Akibatnya, masyarakat kesulitan mendapatkan data yang mereka butuhkan untuk berpartisipasi aktif. Padahal, informasi yang mudah diakses itulah yang seharusnya menjadi pendorong utama bagi partisipasi publik dan pengawasan yang lebih luas dari masyarakat. Tanpa kemudahan akses ini, masyarakat akan kesulitan untuk melakukan pengawasan yang efektif, memberikan masukan berbasis data, atau bahkan sekadar memahami kebijakan yang memengaruhi hidup mereka. Pada

akhirnya, tanpa kemudahan akses informasi, potensi KIP untuk benar-benar mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel akan sulit tercapai secara optimal bahkan cenderung stagnan (Mujiburrahman, Suryadi, & Budhi, 2019).



Gambar 1. Peta Sebaran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2024

Sumber: Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia

Gambar 1 menunjukkan peta sebaran indeks KIP Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Peta ini menggambarkan tingkat keterbukaan informasi di seluruh provinsi di Indonesia berdasarkan hasil survei terbaru warna latar belakang angka di setiap provinsi menunjukkan tingkat capaian indeks dan perubahan dari tahun sebelumnya. Dalam peta menunjukkan bahwa Provinsi Lampung memperoleh skor 67,34 pada tahun 2024, turun dari skor 71,92 pada tahun 2023, dengan nilai perubahan -4,58. Penurunan ini menandakan adanya kemunduran dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi di wilayah tersebut. Provinsi yang memiliki indeks tinggi ditandai dengan warna latar hijau, yang menunjukkan kategori baik atau informatif, sedangkan latar berwarna merah menunjukkan provinsi dengan skor rendah yang masuk dalam kategori kurang informatif atau bahkan tidak informatif. Dalam peta tersebut menunjukkan Papua Barat, mengalami penurunan tajam dengan skor 59,40 pada 2024 dari sebelumnya 64,36, turun sebesar -4,96 poin. Sementara itu, Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan hasil positif yang cukup signifikan dengan lonjakan indeks sebesar Bappeda 5,19 poin dari tahun sebelumnya. Situasi ini menggambarkan bahwa masih banyak tantangan struktural maupun kultural dalam mewujudkan keterbukaan informasi yang ideal. Kurangnya sosialisasi mengenai hak dan kewajiban informasi, baik di tingkat internal organisasi maupun kepada masyarakat umum, menjadi salah satu hambatan utama (Nababan, 2019). Sebaliknya, ketika pemerintah daerah memiliki platform digital yang dikelola dengan baik, didukung oleh

sumber daya manusia dan teknologi informasi yang kompeten, kualitas layanan informasi publik cenderung meningkat (Tawai, 2020). Lebih jauh lagi, keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh seberapa besar komitmen dari para pengambil kebijakan, integritas pelaksana di lapangan, serta struktur birokrasi yang adaptif dan benar-benar berorientasi pada pelayanan (Indah & Hariyanti, 2018). Fenomena ini menunjukkan bahwa keberhasilan keterbukaan informasi tidak semata-mata ditentukan oleh adanya regulasi, tetapi sangat bergantung pada kesiapan sumber daya, sistem, dan budaya birokrasi di masing-masing daerah. Peta ini tidak hanya menunjukkan angka, tetapi juga menunjukkan bagaimana implementasi keterbukaan informasi di Indonesia masih sangat beragam. Ada daerah yang progresif, dan terdapat juga yang masih stagnan atau bahkan mundur. Melalui peta ini, dapat terlihat bahwa tantangan dan capaian keterbukaan informasi tidak merata, dan memperlihatkan pentingnya evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan KIP di daerah-daerah.



Gambar 2. Penerimaan Penghargaan Badan Publik Informatif Dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024

Sumber: Website Bappeda Provinsi Lampung

Setelah melihat peta gambaran umum keterbukaan informasi publik di Indonesia melalui Gambar 1, terlihat bahwa terdapat variasi di setiap daerah dan masih banyak daerah yang berada dalam kategori rendah, termasuk beberapa instansi di Provinsi Lampung yang belum mampu mencapai standar keterbukaan yang ideal. Meski demikian, situasi ini tidak berlaku merata. Justru di tengah berbagai tantangan tersebut, muncul contoh menarik dari salah satu badan publik yang berhasil menunjukkan capaian positif.

Gambar 2 menunjukkan momen ketika Bappeda Provinsi Lampung menerima penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 dengan predikat “Informatif”, yakni kategori tertinggi yang diberikan oleh Komisi Informasi Provinsi

Lampung. Berdasarkan laporan pelayanan informasi publik, Bappeda Provinsi Lampung secara tiga tahun berturut-turut meraih predikat Badan Publik Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik, dengan nilai yang sama yaitu Sangat Baik. Pada Tahun 2022, Bappeda memperoleh nilai 97,506 dalam Kategori OPD Pemerintah Provinsi Lampung, kemudian pada tahun 2023, nilai yang didapatkan adalah 91,86 dan terakhir, tahun 2024, Bappeda berhasil meraih nilai 94,4. Penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bisa dicapai secara optimal melalui strategi yang tepat, dukungan teknologi, dan komitmen organisasi.

Untuk memperjelas kategori Bappeda dalam implementasi KIP, tabel berikut disajikan untuk memberikan gambaran perbandingan antara capaian Bappeda dan sejumlah OPD maupun instansi vertikal lainnya di Provinsi Lampung. Data ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa capaian informatif yang diraih oleh Bappeda bukanlah sesuatu yang otomatis diraih oleh semua instansi, melainkan hasil dari proses yang berbeda-beda pada tiap lembaga. Data pada tabel diperoleh dari Laporan Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 yang dirilis oleh Komisi Informasi Provinsi Lampung.

Tabel 1. Kategori KIP OPD dan Instansi Vertikal

No	Nama	Kategori
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Informatif
2.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung	Cukup Informatif
3.	Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta	Cukup Informatif
4.	Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung	Informatif
5.	Bawaslu Provinsi Lampung	Informatif
6.	BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung	Informatif
7.	Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung	Cukup Informatif
8.	Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	Informatif
9.	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung	Menuju informatif
10.	Perwakilan Ombudsman Provinsi Lampung	Cukup Informatif

Sumber: Laporan Indeks Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Lampung (2024)

Dari tabel mengenai katogeri KIP OPD dan instansi vertikal, terlihat jelas bahwa hanya sebagian kecil instansi yang berhasil masuk ke dalam kategori “Informatif”, termasuk Bappeda Provinsi Lampung. Selain itu, terdapat beberapa OPD yang baru mencapai tingkat “Cukup Informatif”, bahkan masih ada yang berada pada posisi “Menuju Informatif”, seperti OJK Provinsi Lampung. Fenomena ini terlihat jelas dari

perbandingan antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung. Bappeda berhasil meraih penghargaan sebagai OPD Paling Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024, sebuah pengakuan atas komitmen dan konsistensi mereka dalam memberikan informasi yang transparan. Di sisi lain, laporan yang sama menunjukkan bahwa Balitbangda Provinsi Lampung masih berada dalam kategori "Cukup Informatif" karena menghadapi sejumlah kendala.

Berdasarkan laporan IKIP Provinsi Lampung tahun 2024 kendala yang dihadapi Lembaga pemerintah yg belum mencapai kategori informatif seperti Balitbangda mencakup tiga aspek utama. Pertama, meskipun informasi umum telah tersedia, masyarakat masih kesulitan mengakses data penting seperti informasi keuangan, laporan tahunan dan pengadaan barang dan jasa yang menghambat pengawasan publik. Kedua, dari sisi internal, peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) belum optimal karena sering merangkap jabatan, menyebabkan tugas-tugas penting seperti pelaporan tahunan dan pemutakhiran data tidak berjalan konsisten. Terakhir, terdapat masalah mendasar pada pemahaman dan inisiatif minimnya edukasi dan pelatihan bagi PPID menyebabkan pemahaman yang tidak seragam tentang prinsip keterbukaan, diperburuk oleh kurangnya inisiatif dalam menyebarkan informasi secara proaktif.

Dalam pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik, penting untuk memahami amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang mewajibkan setiap badan publik menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi, berpartisipasi dalam proses kebijakan, serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Badan publik, termasuk Bappeda dan Balitbangda Provinsi Lampung, berkewajiban menyediakan dan menyebarluaskan informasi publik di bawah kewenangannya, kecuali yang dikecualikan oleh peraturan. Untuk mendukung pelaksanaannya, setiap instansi menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai penanggung jawab layanan informasi. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah telah menyesuaikan kebijakan daerah agar sejalan dengan ketentuan UU KIP melalui penerapan berbagai regulasi, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP. Selain itu, komitmen di tingkat Pemerintah Daerah diwujudkan melalui penetapan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pelayanan

Informasi Publik, yang menjadi dasar bagi seluruh perangkat daerah Provinsi Lampung untuk melaksanakan keterbukaan informasi secara transparan.

Dalam upaya mewujudkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tertulis dalam UU KIP, media *website* PPID Bappeda Provinsi Lampung <https://Bappeda.lampungprov.go.id/> menjadi penghubung utama secara digital bagi masyarakat untuk mengakses informasi publik. *Website* ini dirancang sebagai platform interaktif dan komprehensif yang secara aktif mendukung pemenuhan hak atas informasi sebagaimana diamanatkan secara tegas oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berikut adalah tampilan halaman utama *website* PPID Bappeda Provinsi Lampung yang memperjelas bagaimana tampilannya dirancang untuk kemudahan aksesibilitas informasi.



Gambar 3. Tampilan *Website* Bappeda Provinsi Lampung

Sumber: *Website Bappeda Provinsi Lampung*

<https://Bappeda.lampungprov.go.id/>

Gambar 3 menunjukkan tampilan *website* Bappeda Provinsi Lampung. Ketika masyarakat mengakses laman utama *website* Bappeda Provinsi Lampung, masyarakat akan disambut dengan tampilan yang terstruktur, menampilkan menu yang intuitif di bagian atas, seperti Profil, Agenda, Berita, Dokumen, Kontak, Galeri, dan yang terpenting, menu khusus PPID yang memberikan informasi terkini atau paling sering dicari yaitu daftar berita terbaru di halaman muka, memberikan kesan dinamis dan responsif terhadap kebutuhan informasi publik.

Kesesuaian *website* PPID Bappeda Provinsi Lampung dengan ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2008 dapat dilihat melalui fitur-fitur dan konten yang disediakannya. Pada bagian

PPID di *website*, yang merupakan inti pelayanan informasi publik, tersedia submenu seperti Daftar Informasi Publik. Fitur ini secara langsung merealisasikan mandat UU KIP, yang mewajibkan setiap badan publik untuk menyediakan dan mengumumkan informasi secara berkala. Melalui DIP ini, masyarakat dapat secara proaktif mengakses beragam dokumen penting perencanaan pembangunan daerah, ringkasan program dan kegiatan, laporan keuangan, laporan aset, hingga informasi mengenai peraturan daerah dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bappeda. Contohnya, masyarakat dapat menemukan dokumen-dokumen strategis seperti RPJPD, RPJMD untuk berbagai periode, dan RKPD lengkap dengan evaluasinya, serta rincian anggaran yang diatur dalam bagian dokumen.

Kehadiran informasi secara proaktif di *website* menunjukkan komitmen Bappeda untuk mempermudah akses informasi dan memenuhi hak publik. Lebih jauh lagi, *website* ini juga memfasilitasi hak masyarakat untuk memperoleh informasi setiap saat sesuai dengan UU KIP. Tersedia form permohonan informasi yang dapat diisi secara daring, memungkinkan masyarakat mengajukan permintaan data atau dokumen spesifik yang tidak tersedia secara proaktif. Mekanisme ini penting untuk memastikan bahwa informasi yang bersifat dikecualikan atau memerlukan verifikasi lebih lanjut tetap dapat diakses melalui prosedur resmi. Apabila terdapat penolakan permohonan atau ketidakpuasan terhadap informasi yang diterima, *website* juga menyediakan form keberatan atas permohonan. Fitur ini secara langsung menjamin hak pemohon untuk mengajukan sanggahan. Transparansi prosedur juga sangat ditekankan dengan adanya alur pelayanan dan SOP pelayanan publik yang dipublikasikan secara jelas di *website*, memberikan panduan langkah demi langkah bagi pemohon dan menunjukkan standar layanan yang diharapkan. Selain itu, adanya Laporan tahunan pelayanan informasi publik secara terbuka di *website* menegaskan akuntabilitas kinerja PPID Bappeda kepada masyarakat.

Efektivitas dan kepatuhan *website* PPID Bappeda Provinsi Lampung dalam menyelenggarakan pelayanan informasi publik juga tervalidasi melalui hasil survei eksternal. Berdasarkan Laporan Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Lampung Tahun 2024, Bappeda Provinsi Lampung berhasil meraih kategori "Informatif". Capaian prestasi ini merupakan indikator bahwa Bappeda telah menempatkan diri sebagai lembaga yang transparan dan responsif dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi. Dalam laporan IKIP, predikat "Informatif" diberikan

berdasarkan serangkaian kriteria dan indikator yang sangat komprehensif. Ini mencakup evaluasi terhadap ketersediaan informasi yang proaktif (informasi yang wajib diumumkan tanpa diminta), digitalisasi (penyampaian informasi melalui platform digital seperti *website* dan media sosial), kelengkapan dan akurasi data yang disajikan, serta pelayanan informasi yaitu pemahaman pegawai atas prosedur, mekanisme komplain dalam layanan informasi diberikan oleh petugas PPID. Pencapaian kategori "Informatif" oleh Bappeda secara implisit menegaskan bahwa *website* PPID Bappeda telah memenuhi standar. Ini berarti Bappeda berhasil memenuhi semua indikator sedangkan balitbangda hanya memenuhi dua indikator.



Gambar 4. Tampilan Website Balitbangda Provinsi Lampung

Sumber: Website Balitbangda Provinsi Lampung

<https://Balitbangda.lampungprov.go.id/>

Gambar 4 menunjukkan tampilan *website* Balitbangda Provinsi Lampung Berbeda dengan Bappeda, hasil penelusuran terhadap *website* Balitbangda Provinsi Lampung menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam implementasi KIP. Meskipun keduanya memiliki menu PPID, penelusuran lebih dalam menunjukkan bahwa kualitas dan kelengkapan isi di dalamnya sangat berbeda. Informasi penting seperti Daftar Informasi Publik (DIP) tidak ditemukan secara terstruktur, dan dokumen penting seperti laporan keuangan per tahun, laporan PPID tahunan, laporan pelayanan informasi publik per tahun tidak ter *update* dan pengadaan barang dan jasa tidak tersedia secara proaktif. Hal ini sejalan dengan laporan IKIP dari Komisi Informasi Lampung yang menyatakan adanya kendala dalam akses data spesifik. Selain itu, mekanisme pelayanan permohonan informasi juga belum sepenuhnya terfasilitasi, karena tidak tersedia formulir permohonan daring yang memungkinkan interaksi cepat dan transparan antara masyarakat dan instansi. Perbedaan mencolok ini menjadi bukti awal bahwa

implementasi KIP di kedua instansi tidak sama dan memunculkan pertanyaan tentang faktor-faktor yang menyebabkan satu instansi berhasil dan yang lainnya masih menghadapi kendala.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi KIP dari beragam perspektif, seringkali menekankan permasalahan dan kendala yang dihadapi. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Prabowo (2024) di beberapa badan publik Kota Semarang, mengidentifikasi bahwa implementasi UU KIP masih belum optimal karena berbagai masalah dan faktor penghambat. Senada dengan itu, Ivana (2022) melalui penelitiannya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan juga menyimpulkan adanya tingkat keterbukaan informasi publik yang masih rendah di tingkat lokal, ditandai oleh respons badan publik yang kurang antusias dan terbatasnya akses masyarakat. Penelitian Fadila, Putera, & Ariany (2022) di Universitas Andalas mengulas transparansi sebagai elemen penting dalam *good governance*. Sementara itu, Septina *et.al* (2025) menganalisis implementasi kebijakan melalui sistem informasi di Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan, yang cenderung fokus pada aspek teknis sistem, bukan pada faktor hasil yang berbeda dari organisasi secara keseluruhan. Bahkan, Nababan (2019) mengidentifikasi rendahnya keterbukaan informasi di lembaga penyiaran publik dan mengusulkan strategi untuk peningkatan dari titik awal yang belum optimal. Dari berbagai penelitian terdahulu masih terbatasnya analisis komparatif yang mendalam tentang faktor-faktor kunci yang menyebabkan perbedaan capaian antar organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan membandingkan implementasi KIP di Bappeda Provinsi Lampung (sebagai kasus keberhasilan) dan Balitbangda Provinsi Lampung (sebagai kasus yang masih menghadapi tantangan).

Penelitian ini bermula dari kesenjangan penelitian (*research gap*) yang ditemukan, Kesenjangan kinerja antara Bappeda yang berhasil dan Balitbangda yang masih menghadapi kendala ini menjadi fenomena menarik yang sangat relevan untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di kedua OPD tersebut. Dengan membandingkan dua kasus dalam satu wilayah yang sama, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang membedakan keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan, serta memberikan rekomendasi yang konkret bagi OPD yang masih menghadapi tantangan. Meskipun banyak penelitian terdahulu telah

mengkaji berbagai kendala dan masalah dalam implementasi KIP, masih terbatasnya analisis mendalam tentang faktor-faktor kunci yang menyebabkan perbedaan implementasi antara satu instansi dan instansi lainnya dalam satu wilayah yang sama. Kebaharuan penelitian ini yaitu membandingkan dua instansi anatara Bappeda dan Balitbangda untuk mengidentifikasi perbedaan dalam implementasi KIP.

Dalam penelitian ini, kebijakan keterbukaan informasi publik dimaknai sebagai serangkaian tindakan dan aktivitas pemerintah dalam mewujudkan keterbukaan informasi, bukan sekedar sebagai produk hukum atau dokumen administratif. Pemaknaan ini sejalan dengan pandangan kebijakan publik yang memandang kebijakan sebagai apa yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Dye dalam Subarsono, 2011). Kebijakan publik pada dasarnya merupakan tindakan terarah yang dilakukan oleh aktor pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu (Anderson dalam Arifin Tahir, 2014).

Dengan demikian, regulasi dan peraturan perundang-undangan dipahami sebagai kerangka normatif dan instrumen kebijakan, namun kebijakan baru benar-benar terwujud melalui proses implementasi dalam bentuk tindakan nyata pemerintah. Implementasi kebijakan merupakan proses penerjemahan keputusan kebijakan ke dalam aksi dan praktik di lapangan yang dilakukan oleh aktor pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia (Tachjan, 2006; Tangkilisan, 2004). Oleh karena itu, implementasi kebijakan tidak dapat dipahami sekedar sebagai kepatuhan terhadap regulasi, melainkan sebagai proses yang mencerminkan bagaimana kebijakan dijalankan, dikoordinasikan, dan diaktualisasikan dalam praktik pemerintahan (Ripley & Franklin dalam Winarno, 2008; Van Meter & Van Horn dalam Winarno, 2008).

Berdasarkan pemaknaan tersebut, fokus penelitian diarahkan pada bagaimana kebijakan keterbukaan informasi publik diimplementasikan melalui dimensi tindakan pemerintah, seperti pola komunikasi, koordinasi antarunit, kapasitas sumber daya, komitmen pelaksana, serta relasi dengan pemangku kepentingan. Untuk menganalisis proses implementasi tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka Teori Implementasi Kebijakan 7C yang dikemukakan oleh De Coning et al. (2018), yang meliputi aspek *content*, *context*, *commitment*, *capacity*, *clients and coalitions*, *communication*, dan *coordination*. Kerangka teoritik ini dipilih karena mampu memberikan pendekatan

komprehensif dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan implementasi kebijakan sebagai aktivitas pemerintah.

Melalui analisis terhadap tujuh aspek tersebut, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bagaimana variasi tindakan dan kapasitas pemerintah berkontribusi terhadap hasil yang berbeda dalam keterbukaan informasi publik di Bappeda Provinsi Lampung dan Balitbangda Provinsi Lampung. Sementara itu, indikator penilaian keterbukaan informasi publik yang disusun oleh Komisi Informasi digunakan secara terbatas sebagai konteks capaian formal dan rujukan administratif, bukan sebagai instrumen utama analisis. Dengan demikian, penelitian ini tetap berfokus pada analisis implementasi kebijakan sebagai proses dan tindakan pemerintah dalam mendukung keterbukaan informasi publik.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena akan memberikan dua kontribusi utama. Secara teoritis, hasil penelitian ini akan berkontribusi dalam khazanah ilmu Administrasi Negara, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan dan tata kelola pemerintahan. Dengan menganalisis secara komparatif antara Bappeda dan Balitbangda, penelitian ini akan mengisi kesenjangan literatur yang umumnya lebih berfokus pada kendala, penelitian ini akan menganalisis implementasi dan faktor-faktor yang membedakan efektivitas dalam implementasi KIP.

Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai referensi bagi Bappeda, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk mempertahankan dan meningkatkan praktik terbaik yang sudah ada. Sementara itu, bagi Balitbangda yang masih menghadapi kendala, penelitian ini akan memberikan rekomendasi dan referensi dalam menyusun strategi yang efektif untuk mendorong keterbukaan informasi publik dan mewujudkan *good governance*, khususnya dalam hal transparansi. Berdasarkan berbagai data dan paparan di atas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan dengan judul "Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Bappeda dan Balitbangda Provinsi Lampung Tahun 2024"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Bappeda Provinsi Lampung dan Balitbangda Provinsi Lampung?
2. Apakah aspek yang menyebabkan hasil yang berbeda dalam implementasi KIP antara Bappeda Provinsi Lampung dengan Balitbangda Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan implementasi KIP di Bappeda Provinsi Lampung dan Balitbangda Provinsi Lampung
2. Untuk mengetahui aspek yang menyebabkan hasil yang berbeda dalam implementasi KIP di Bappeda Provinsi Lampung dengan Balitbangda Provinsi Lampung

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat berkontribusi dalam kajian Ilmu Administrasi Negara, khususnya tentang bagaimana kebijakan keterbukaan informasi publik benar-benar dijalankan di dalam instansi pemerintah. Selama ini, banyak penelitian lebih fokus pada berbagai kendala implementasi KIP. Penelitian ini melengkapi kajian tersebut dengan menunjukkan bahwa perbedaan implementasi KIP antar instansi tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya aturan dan sumber daya, tetapi oleh konsistensi pelaksanaan, kapasitas nyata aparatur, serta pola koordinasi dan komitmen pimpinan. Melalui analisis perbandingan antara Bappeda dan Balitbangda menggunakan kerangka 7C De Coning, penelitian ini memberi gambaran bahwa dalam praktik administrasi pemerintahan, aspek-aspek implementasi kebijakan saling terkait dan tidak dapat dipahami secara terpisah.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai bahan referensi bagi Bappeda Provinsi Lampung untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas implementasi KIP. Lebih jauh, temuan penelitian ini juga dapat menjadi dasar pertimbangan bagi Bappeda Provinsi Lampung dalam merancang strategi yang lebih efektif guna mendorong praktik keterbukaan

informasi di lingkungan lembaga publik. Dan menjadi bahan evaluasi bagi Balitbangda Provinsi Lampung untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam implementasi KIP. Dengan demikian, kualitas implementasi KIP dapat ditingkatkan, sekaligus berkontribusi pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik KIP. Selain itu, akan dibahas juga konsep-konsep yang mendukung penelitian, seperti implementasi kebijakan, efektivitas pelaksanaannya, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memanfaatkan studi-studi terdahulu sebagai salah satu rujukan guna memperkuat basis teoretis yang diaplikasikan dalam penelitian ini. Dalam pelaksanaannya, peneliti merujuk pada beberapa kajian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan disajikan dalam format tabel berikut ini

Tabel 2. Kajian Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik Di desa kumpulrejo kecamatan patebon kabupaten kendal, Hamami Aulia, 2023 (SKRIPSI)	Hasil penelitian dengan menganalisis dua variabel, dari model Merilee S. Grindle yaitu <i>content of policy dan context of policy</i> , menunjukkan bahwa masyarakat masih mengakses informasi dengan mendatangi langsung kantor desa. Agar KIP lebih optimal, perlu ada layanan permohonan informasi online. Langkah ini akan memudahkan masyarakat mendapat informasi yang dibutuhkan.	Kedua penelitian ini sangat terkait karena sama-sama menganalisis pelaksanaan KIP. Keduanya juga memakai metodologi kualitatif dengan studi kasus. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus yang signifikan. Penelitian terdahulu mengidentifikasi kendala dalam implementasi KIP, sedangkan penelitian ini berfokus pada perbandingan implementasi KIP antara Bappeda dan Balitbangda Provinsi Lampung dengan analisis 7c de Coning.

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
2.	Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik oleh Dinas Kominfo Pemerintahan Kota Tasikmalaya, Tiara indah 2018 (SKRIPSI)	Penelitian ini menggunakan model George Edward III yang menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik dipengaruhi oleh komunikasi yang cukup baik melalui media sosial, meski sebagian informasi masih harus ditanyakan langsung. Sumber daya juga terbatas, baik jumlah staf maupun fasilitas, meskipun petugas sudah kompeten. Disposisi dan struktur birokrasi mendukung melalui SOP dan koordinasi antar level pemerintahan.	Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus utama dan konteks keberhasilan. Jika studi terdahulu berfokus pada dinamika implementasi KIP dengan model George Edward III di Diskominfo Tasikmalaya sementara itu, penelitian ini menganalisis perbandingan implementasi KIP antara Bappeda dan Balitbangda Provinsi Lampung dengan fokus pada 7 aspek de Coning dalam implementasi dan faktor yang menyebabkan perbedaan capaian dalam pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di tingkat provinsi.
3.	Analisis Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Website UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Rahmat Zuhlul 2022 (SKRIPSI)	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik melalui website resmi UIN Ar-Raniry belum berjalan optimal dan belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maupun standar layanan informasi publik. Beberapa informasi penting belum ditampilkan, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan informasi juga belum tersedia. Hambatan utama berasal dari rendahnya pemahaman pejabat terkait dan keterbatasan anggaran dalam pengembangan layanan informasi. Dengan demikian, implementasi keterbukaan informasi di UIN Ar-Raniry masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat pencapaian optimal.	Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya. Jika penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik di UIN Ar-Raniry masih belum optimal akibat belum terpenuhinya standar layanan informasi, belum tersedianya SOP, serta hambatan pada pemahaman aparatur dan keterbatasan anggaran, maka penelitian ini maka penelitian ini justru berfokus pada studi komparatif, mengungkap faktor-faktor yang membuat satu instansi berhasil (Bappeda) dan yang lainnya belum optimal (Balitbangda), melalui analisis 7 aspek dari De Coning. dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik secara efektif dan terukur.

Dari beberapa hasil penelitian di atas, keterkaitan dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana implementasi keterbukaan informasi publik dijalankan oleh berbagai instansi. Oleh karena itu yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti akan berfokus pada studi komparatif untuk mengungkap mengapa dalam

satu wilayah yang sama, terdapat perbedaan hasil implementasi yang signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut, dengan membandingkan secara mendalam faktor-faktor implementasi kebijakan KIP di Bappeda dan Balitbangda Provinsi Lampung, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika keberhasilan dan kendala yang dialami lembaga pemerintah. Penelitian ini akan secara khusus menggunakan teori Implementasi (7-C) yang dikemukakan oleh De Coning *et al.* (2018), yang mengidentifikasi tujuh aspek utama yang memengaruhi implementasi yaitu Isi Kebijakan (*Content*), Konteks (*Context*) di mana kebijakan diterapkan, Komitmen (*Commitment*) dari para pelaksana, Kapasitas (*Capacity*) sumber daya yang tersedia, Klien dan Koalisi (*Clients and Coalitions*), strategi Komunikasi (*Communication*) yang digunakan, dan aspek Koordinasi (*Coordination*) antar pihak. Ketujuh aspek ini akan dianalisis secara mendalam untuk memahami bagaimana kaitannya dengan keberhasilan Bappeda Provinsi Lampung dalam menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik hingga mencapai informatif.

2.2 Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan

2.2.1 Definisi Implementasi Kebijakan

Menurut Luke Fowler (2024), implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai fase bergerak dan saling tergantung dalam siklus kebijakan publik yang terjadi setelah suatu kebijakan diadopsi. Secara lebih rinci, makna implementasi kebijakan menurut Fowler adalah sebagai berikut:

a. Transisi dari Keputusan ke Tindakan

Implementasi adalah tahap di mana rencana atau keputusan politik (yang sudah disetujui, seperti undang-undang atau peraturan) mulai diartikan dan diwujudkan menjadi tindakan nyata di lapangan. Ini adalah jembatan antara apa yang diputuskan dan apa yang benar-benar terjadi dalam praktik.

b. Fase yang Saling Bergantung

Fowler menekankan bahwa implementasi bukan proses yang terpisah atau terisolasi. Sebaliknya, ia saling bergantung dengan fase-fase kebijakan lain seperti penetapan agenda (*agenda-setting*) dan adopsi kebijakan (*policy adoption*). Ini berarti apa yang terjadi pada tahap sebelumnya akan memengaruhi implementasi dan sebaliknya, bagaimana kebijakan diimplementasikan dapat memengaruhi agenda atau bahkan adopsi

kebijakan di masa depan. Ketiga fase ini harus dipahami sebagai bagian dari satu proses kebijakan yang lebih besar.

c. Proses Mencari Makna (*Sense making*) dan Interpretasi

Ini adalah poin yang sangat ditekankan oleh Fowler. Implementasi adalah proses di mana para pelaksana kebijakan harus mencari makna atau menginterpretasikan kebijakan yang seringkali bersifat ambigu atau tidak jelas. Kebijakan jarang sekali sangat spesifik dalam setiap detail pelaksanaannya, sehingga para birokrat, petugas lapangan, atau aktor lain yang terlibat dalam implementasi harus menafsirkan bagaimana kebijakan itu harus dijalankan dalam konteks spesifik mereka. Interpretasi ini menjadi prasyarat penting bagi setiap perilaku implementasi.

d. Pergeseran dari Pilihan Kolektif ke Aksi Kolektif

Dalam implementasi kebijakan, fokusnya bergeser dari pilihan kolektif saat kebijakan diputuskan oleh pembuat keputusan ke aksi kolektif. Artinya, keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada kerja sama, koordinasi, dan interaksi nyata antara berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat. Jadi, kebijakan tidak lagi hanya sebatas keputusan tertulis, tapi menjadi upaya bersama banyak pihak untuk mewujudkan tujuannya di lapangan.

Dengan demikian, menurut Luke Fowler, implementasi kebijakan bukan sekadar menjalankan perintah, tetapi merupakan proses kompleks yang melibatkan interpretasi, interaksi antar aktor, dan adaptasi terhadap ambiguitas, yang semuanya saling terkait dalam siklus kebijakan yang lebih luas.

Menurut Knill *et.al* (2024), implementasi kebijakan merupakan fase penting dalam siklus kebijakan publik di mana kebijakan atau keputusan politik yang telah dirumuskan diubah menjadi serangkaian tindakan nyata dan operasional di lapangan. Proses ini tidak hanya melibatkan pelaksanaan instruksi secara pasif, melainkan juga mencakup serangkaian kegiatan yang kompleks dan dinamis yang dilakukan oleh lembaga-lembaga administrasi atau birokrasi yang diberi mandat. Ini termasuk bagaimana para pegawai di instansi terkait mulai melaksanakan aturan-aturan tersebut, memantau apakah semuanya berjalan sesuai rencana, mengendalikan agar tidak ada penyimpangan, dan bahkan menegakkan sanksi jika ada pelanggaran.

Knill menjelaskan bahwa implementasi kebijakan bukan hanya tugas teknis, melainkan sebuah kegiatan di mana sumber daya, prioritas, dan kapasitas birokrasi diuji. Ketika birokrasi mengalami kelebihan beban tugas kebijakan yaitu terlalu banyak kebijakan yang harus diimplementasikan dengan sumber daya terbatas, mereka secara tidak terhindarkan akan melakukan "*triage policy*". Ini berarti mereka akan memilih dan memprioritaskan tugas implementasi tertentu dengan memberi perhatian penuh sambil mengabaikan atau menunda tugas lain. Model ini mengidentifikasi dua faktor utama yang menentukan sejauh mana "*triage policy*" ini terjadi yaitu:

1. Seberapa Rentan Organisasi terhadap Kelebihan Beban

Ini adalah seberapa mudah organisasi merasa kewalahan. Terjadi jika ada tekanan politik kuat untuk mengimplementasikan banyak kebijakan tanpa tambahan sumber daya yang memadai, dan jika organisasi kurang mampu mencari bantuan atau sumber daya dari pihak luar.

2. Seberapa Komitmen Organisasi untuk Mengatasi Kelebihan Beban

Ini adalah upaya internal organisasi untuk mengurangi dampak kelebihan beban. Organisasi yang punya rasa memiliki terhadap suatu kebijakan dan aktif mengadvokasikannya cenderung lebih berkomitmen untuk melindunginya dari efek *triage*.

Knill berpendapat bahwa pertumbuhan jumlah kebijakan yang tidak diimbangi dengan kapasitas birokrasi yang memadai akan menyebabkan fenomena "*triage policy*". Ini adalah alasan mengapa banyak kebijakan, meskipun niatnya baik, seringkali tidak berjalan optimal di lapangan karena birokrasi terpaksa memilah mana yang bisa dan tidak bisa mereka kerjakan secara penuh. Knill memahami bahwa kinerja implementasi kebijakan itu sangat tergantung pada bagaimana organisasi pemerintah menghadapi tumpukan tugas yang terus bertambah ini.

Menurut De Coning *et al.* (2018) Implementasi kebijakan adalah proses politik yang kompleks, bukan sekadar sistem pengelolaan yang kaku, memungkinkan kita untuk menilai bagaimana implementasi bisa dibentuk agar tujuan yang ditetapkan tercapai lebih baik. De Coning, mengemukakan bahwa ada tujuh aspek yang dapat memengaruhi arah suatu kebijakan. Konsep ini sendiri merupakan pengembangan dari kerangka asli "5-C" yang pernah disebutkan oleh Brynard di

awal tahun 2000-an. Brynard (2005) sendiri mengidentifikasi kelima aspek awal tersebut, yaitu isi kebijakan (konten), konteksnya, komitmen pelaksana, kapasitas yang tersedia, serta peran klien dan kelompok pendukung. Namun, perlu dicatat bahwa dalam karya-karya Brynard antara tahun 2000 hingga 2017, aspek komunikasi cenderung kurang mendapat perhatian.

De Coning *et al.* (2018) mengemukakan bahwa terdapat 7 aspek yang dapat memengaruhi arah kebijakan. Oleh karena itu, aspek ini bisa sangat membantu dalam menilai dan memahami dampak kebijakan yang sudah diimplementasikan. Tujuh aspek ini adalah pengembangan dari lima aspek awal yang dikemukakan oleh Brynard pada awal tahun 2000-an. Brynard (2005) mendefinisikan aspek awalnya sebagai konten, konteks, komitmen, kapasitas, klien, dan koalisi.

Berikut adalah ketujuh aspek tersebut:

1. *Content* (Isi Kebijakan)

Isi kebijakan adalah apa yang tertulis di kebijakan itu sendiri. Apa tujuannya, bagaimana cara kerjanya, apakah isinya jelas, tidak membingungkan, dan bisa diterapkan. Menurut pandangan pakar implementasi kebijakan seperti Smith (1973) serta Van Meter dan Van Horn (1975), isi dari sebuah kebijakan memiliki peran penting, tidak hanya dalam menentukan bagaimana kebijakan tersebut dijalankan untuk mencapai sasarannya, tetapi juga dalam proses penetapan sasaran itu sendiri dan pemilihan strategi spesifik untuk mencapainya. Van Meter dan Van Horn mengemukakan bahwa kejelasan dan jenis sasaran kebijakan awal akan menentukan bagaimana kebijakan itu diterima dan dijalankan di lapangan.

Terdapat 3 poin utama dalam isi kebijakan yaitu

- 1) Kejelasan Tujuan dan Sasaran

Isi kebijakan harus mendefinisikan secara jelas tujuan yang ingin dicapai dan bagaimana kebijakan tersebut akan dijalankan. Van Meter dan Van Horn (1975) menekankan bahwa kejelasan sasaran awal sangat menentukan penerimaan dan pelaksanaan kebijakan di lapangan.

2) Keterterapan (*Feasibility*)

Menilai apakah isinya tidak membingungkan dan bisa diterapkan. Jika isi kebijakan tidak jelas, sulit untuk melaksanakannya dengan benar.

3) Konsistensi Internal

Isi kebijakan harus selaras di antara berbagai bagiannya. Inkonsistensi atau isi yang membingungkan dapat mengurangi komitmen pelaksana dan sulit untuk dijalankan.

2. *Context* (Konteks)

Konteks merupakan lingkungan atau kondisi di mana kebijakan itu akan dijalankan. Kondisi ini bisa berupa situasi masyarakat, budaya, ekonomi, politik, atau aturan di lembaga tempat kebijakan itu diterapkan. Siapa saja yang terlibat dan bagaimana hubungan mereka. Menurut Najam (1995), konteks sangat penting karena membantu mengidentifikasi pihak-pihak utama di institusi, konflik internal dan antar lembaga, serta perkembangan hubungan antara sasaran kebijakan dengan lembaga pelaksana. Kebijakan yang berhasil adalah yang niatnya disesuaikan dengan kenyataan di lapangan. Jika kita tidak memahami kondisi di mana kebijakan itu akan maka kebijakan tersebut sulit berhasil.

3. *Commitment* (Komitmen)

Komitmen merupakan tekad, niat sungguh-sungguh, dan dukungan dari semua pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, mulai dari pemimpin tertinggi sampai petugas di lapangan. Warwick (1982) mengemukakan bahwa meskipun terdapat sistem pemerintahan yang terorganisir dan efisien untuk melaksanakan suatu kebijakan, tidak akan ada kemajuan berarti tanpa adanya kesungguhan atau dedikasi dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaannya. Komitmen dibutuhkan dalam setiap proses kebijakan. Mereka yang terlibat dalam proses ini harus memiliki rasa memiliki terhadap suatu Lembaga sehingga dapat meningkatkan komitmen mereka (Molobela, 2019). Apakah mereka benar-benar ingin kebijakan ini berhasil. Bahkan jika struktur organisasi sudah bagus dan sumber daya ada, tanpa kemauan yang kuat dari pelaksana, implementasi kebijakan akan mengalami kendala. Komitmen ini bisa datang dari atas misalnya, karena aturan yang

ketat atau dari bawah karena kesadaran dan keinginan pelaksana. Komitmen ini terbagi menjadi tiga aspek utama:

1) Dedikasi Pelaksana

Warwick (1982) menggarisbawahi bahwa tanpa adanya kesungguhan atau dedikasi dari pihak yang terlibat langsung, sulit ada kemajuan, bahkan jika sistem pemerintahan sudah terorganisir.

2) Rasa Memiliki (*Ownership*)

Pihak yang terlibat harus memiliki rasa memiliki terhadap lembaga atau kebijakan (Molobela, 2019), yang secara langsung akan meningkatkan komitmen mereka.

3) Aspek Pengaruh Dua Arah

Komitmen bisa datang dari atas (misalnya, karena aturan yang ketat) atau dari bawah (karena kesadaran dan keinginan pelaksana). Komitmen ini sifatnya saling memengaruhi dengan semua aspek 7-C lainnya.

4. *Capacity* (Kapasitas)

Kapasitas merupakan segala sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan. Kapasitas sangat berpengaruh bagi keberhasilan kebijakan dan kualitas layanan publik. Pentingnya kapasitas ini bahkan perlu dipertimbangkan sejak awal proses implementasi (Segovia dan Ramos, 2018). Menyediakan sumber daya yang cukup dan tepat bukanlah hal yang mudah. Kapasitas yang memadai sangat penting agar implementasi berjalan efisien dan efektif. Aspek ini saling memengaruhi dengan isi kebijakan, karena isi kebijakan bisa menentukan sumber daya apa yang paling tepat, dan ketersediaan sumber daya juga bisa membentuk ulang cara kebijakan dijalankan. Kapasitas ini terbagi menjadi dua aspek utama:

1) Sumber Daya Berwujud (*Tangible*)

Meliputi sumber daya fisik dan material, yaitu sumber daya manusia (staf yang kompeten), keuangan (dana), dan teknologi.

2) Sumber Daya Tak Berwujud (*Intangible*)

Meliputi kualitas non-fisik seperti kepemimpinan dan motivasi.

5. *Clients and Coalitions* (Klien dan Koalisi)

Klien adalah pihak yang menjadi sasaran langsung atau penerima manfaat dari kebijakan yaitu masyarakat. Koalisi adalah kelompok-kelompok di luar pemerintah seperti kelompok kepentingan atau pemimpin opini yang bisa memengaruhi atau mendukung jalannya kebijakan. Menurut Rondinelli (1997), keberhasilan implementasi kebijakan membutuhkan strategi yang jelas untuk melayani masyarakat (klien) dan membangun dukungan (koalisi). Ini berarti pemerintah harus memiliki mekanisme formal agar semua pihak yang terkait diperlakukan secara adil dan dilibatkan dalam tata kelola pemerintahan. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada bagaimana kelompok sasaran klien bereaksi terhadap kebijakan, dan apakah ada kelompok pendukung koalisi yang kuat. Pemerintah perlu mengidentifikasi siapa saja pemangku kepentingan kunci ini, karena perubahan dukungan dari kelompok-kelompok di luar bisa mengubah proses implementasi.

6. *Communication* (Komunikasi)

Komunikasi adalah cara informasi tentang kebijakan disampaikan, diterima, dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Wunderlich (2012) menggarisbawahi pentingnya komunikasi sebagai kunci implementasi kebijakan yang sukses. Komunikasi yang baik sangat penting untuk transparansi dan pemerintahan yang baik. Apakah semua pihak yang terlibat sudah tahu dan mengerti tentang kebijakan ini dan apakah ada saluran untuk bertanya atau memberi masukan. Ketika informasi disampaikan dengan jelas dan semua pihak terlibat dalam proses pengambilan keputusan, mereka cenderung lebih mendukung kebijakan tersebut. Sebaliknya, kurangnya komunikasi bisa menimbulkan ketidaksetujuan dan penolakan dari pihak yang dituju.

Terdapat 3 faktor utama dalam komunikasi yaitu:

1) Kejelasan Pesan Kebijakan

Instruksi harus mudah dipahami oleh pelaksana di semua tingkatan, dan informasi harus disajikan kepada publik dengan bahasa yang aksesibel. Kegagalan komunikasi sering terjadi ketika instruksi teknis dibuat terlalu kabur, ambigu.

2) Saluran Komunikasi

Saluran Komunikasi yang digunakan harus efektif yang terpenting, harus ada mekanisme Umpan Balik (*Feedback*) yang sistematis, memungkinkan masyarakat menyampaikan masalah dan usulan kepada pemerintah.

3) Transparansi Informasi

sejauh mana data dan keputusan yang mendasari kebijakan dibuka kepada publik.

7. *Coordination* (Koordinasi)

Koordinasi adalah bagaimana semua pihak yang berbeda baik di dalam satu lembaga maupun antar lembaga yang berbeda bekerja sama dan menyelaraskan kegiatan mereka untuk mencapai tujuan kebijakan.

Koordinasi meliputi:

1) Intraorganisasi (antar unit dalam satu organisasi)

2) Interorganisasi (antar organisasi dengan organisasi lain, NGO/swasta)

Koordinasi merupakan aspek penting yang saling memengaruhi dengan faktor implementasi lainnya (Robinson, Hewitt & Harris 2000). Menurut Burger (2018), koordinasi adalah aspek penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Meskipun semua faktor lain (konten, konteks, komitmen, kapasitas, klien, dan koalisi) sudah ada, tanpa koordinasi yang baik, implementasi kebijakan bisa gagal. Mintzberg (1979) menyatakan bahwa seiring bertambahnya kompleksitas organisasi, dibutuhkan berbagai mode koordinasi seperti saling menyesuaikan diri antar tim, adanya pengawasan langsung, serta membuat aturan atau prosedur standar tentang bagaimana sebuah pekerjaan harus dilakukan. Ini memastikan bahwa semua bagian dan pihak bergerak sejalan, tidak ada yang tumpang tindih atau bertentangan. Koordinasi sangat erat kaitannya dengan komunikasi, komitmen, dan isi kebijakan, karena kurangnya koordinasi sering kali disebabkan oleh kurangnya komunikasi, komitmen, atau kejelasan isi kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses kompleks dan dinamis yang menjembatani antara kebijakan yang telah dirancang dalam bentuk formal dengan realitas penerapannya di lapangan, dengan tujuan utama untuk mencapai hasil yang diharapkan. Proses ini bukan sekadar menjalankan perintah, melainkan melibatkan serangkaian tindakan, penyesuaian, dan interaksi yang membentuk bagaimana sebuah kebijakan benar-benar memberikan dampak.

Dari berbagai pandangan mengenai implementasi kebijakan yang telah dibahas, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan (7-C) oleh De Coning et al. (2018). Pemilihan teori ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kerangka 7-C relevan dan selaras dengan fokus penelitian yang menempatkan kebijakan keterbukaan informasi publik sebagai serangkaian tindakan dan praktik nyata pemerintah, bukan sekadar produk hukum atau dokumen administratif. Dalam penelitian ini, kebijakan dipahami sebagai apa yang pemerintah lakukan atau tidak lakukan, sehingga implementasi menjadi tahap penting yang menentukan apakah kebijakan benar-benar terwujud dalam praktik pemerintahan.

Teori 7-C dipandang sesuai karena melihat implementasi sebagai proses yang dinamis dan tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga pada bagaimana kebijakan dijalankan, diaktualisasikan, serta dikelola dalam konteks kelembagaan yang nyata. Kerangka ini memungkinkan analisis yang mencakup *Content*, *Context*, *Commitment*, *Capacity*, *Clients and Coalitions*, *Communication*, dan *Coordination*. Ketujuh aspek tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk menelaah proses implementasi KIP di Bappeda Provinsi Lampung dan Balitbangda Provinsi Lampung. Melalui kerangka ini, peneliti dapat mengidentifikasi faktor-faktor spesifik terhadap perbedaan hasil implementasi, mulai dari substansi kebijakan, komitmen pelaksana, kapasitas kelembagaan, hingga strategi komunikasi dan pola koordinasi antarunit di kedua instansi. Dengan demikian, penggunaan teori 7-C memungkinkan penelitian ini tidak hanya menggambarkan tingkat keberhasilan implementasi, tetapi juga mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan ketidakefektifan pelaksanaan kebijakan, sehingga temuan penelitian menjadi lebih komprehensif dan kontekstual.

2.2.2 Efektivitas Implementasi Kebijakan

Efektivitas implementasi kebijakan merupakan tingkat keberhasilan sebuah kebijakan dalam mewujudkan hasil nyata di lapangan yang selaras dengan tujuan awal yang telah ditetapkan oleh pembuatnya. Ini berarti proses implementasi berhasil menjembatani kesenjangan antara gagasan dan harapan yang tertulis di atas kertas dengan realitas yang terjadi di tengah masyarakat. Lebih dari sekadar menjalankan serangkaian aktivitas atau menghasilkan laporan administratif, efektivitas menuntut sebuah kebijakan untuk menciptakan perubahan yang signifikan dan positif dalam kondisi, perilaku, atau kualitas hidup kelompok sasaran serta masyarakat secara lebih luas. Keberhasilan ini tidak hanya diukur dari indikator teknis, melainkan juga sangat ditentukan oleh penerimaan dan apresiasi dari masyarakat luas (Simatupang & Akib, 2021). Artinya, sebuah kebijakan tidak hanya perlu terlaksana dengan baik, tetapi juga harus mampu diterima, dirasakan manfaatnya, baik mereka yang menjadi target utama maupun pihak lain yang turut merasakan dampak positif dari jalannya kebijakan tersebut.

Efektivitas implementasi kebijakan merupakan langkah penting dalam kebijakan publik, karena menentukan sukses atau tidaknya suatu kebijakan. Sebaik apa pun suatu kebijakan dirumuskan jika implementasinya tidak berhasil maka kebijakan tersebut kehilangan kebermaknaannya (Sutmasa, 2021). Proses implementasi penting sebab berhubungan langsung dengan kinerja kebijakan serta pencapaian tujuan dan hasil, baik itu dalam bentuk *output* maupun *outcomes*. Dengan demikian, memastikan implementasi berjalan efektif merupakan hal penting untuk mewujudkan pemerintahan yang berhasil.

Efektivitas implementasi kebijakan bisa dilihat dari sejauh mana *output* dan *outcomes* yang muncul di lapangan sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Jika *output* dan *outcomes* minim atau bahkan tidak ada, ini menjadi tanda bahwa kebijakan tidak diterapkan dengan baik, atau bahkan gagal. Mengacu pada model Merilee S. Grindle (dikutip dalam Sutmasa, 2021), keberhasilan implementasi diukur dari dua aspek utama:

1. Proses dengan makna bahwa pelaksanaan kebijakan berlangsung sesuai dengan rencana awal.

2. Apakah sasaran kebijakan tercapai, yang terlihat dari dampak atau pengaruhnya pada masyarakat baik individu maupun kelompok, serta sejauh mana perubahan terjadi dan diterima oleh kelompok yang menjadi target.

Untuk memastikan sebuah implementasi berjalan efektif, diperlukan upaya pengawasan dan pengendalian yang bertanggung jawab. Menurut Sutmasa (2021), ada tiga dimensi utama yang perlu diperhatikan:

1. Pemantauan (*Monitoring*)

Ini melibatkan pengawasan dan pengecekan yang berkelanjutan. Tujuannya adalah mencegah penyimpangan, memastikan proses berjalan sesuai rencana, dan menjaga agar implementasi selaras dengan hasil yang diinginkan

2. Penilaian (*Evaluation*)

Proses ini bertujuan untuk menilai seberapa jauh kebijakan mencapai efektivitas dan tujuannya. Caranya adalah membandingkan apa yang direncanakan dengan kenyataan di lapangan untuk mengidentifikasi dan mengatasi perbedaan yang ada

3. Pemberian Imbalan (*Reward and Punishment*)

Dengan memberikan perlakuan yang seimbang. Kinerja yang baik patut diberi insentif atau apresiasi, sementara kegagalan harus ada konsekuensinya dalam bentuk disinsentif atau hukuman. Ini penting untuk mendorong akuntabilitas dan motivasi para pelaksana.

2.3 Tinjauan Tentang Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good governance*)

2.3.1 Definisi *Good governance*

Menurut Zabidi et.al. (2024) Konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berfungsi sebagai dasar utama yang mendorong terwujudnya standar tertinggi, kualitas optimal, dan kinerja prima dalam berbagai kegiatan sektor publik. Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik ini seringkali teridentifikasi melalui seberapa efisien dan efektif layanan administrasi publik yang disediakan. Konsep tata kelola pemerintahan yang baik ini secara mendasar telah diadopsi dan diintegrasikan ke dalam sebagian besar kebijakan serta rencana pembangunan. Tujuannya adalah untuk senantiasa menjaga dan mempertahankan cara kerja pemerintah agar tetap efisien dan efektif. Pada

intinya, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bagian yang melekat dari sistem tata kelola secara keseluruhan, namun ia secara spesifik diatur dengan menetapkan patokan pada standar tertinggi, kualitas terbaik, dan pencapaian kinerja yang unggul.

Menurut Widanti (2022), *good governance* dipahami sebagai tata kelola pemerintahan yang menitikberatkan pada bagaimana kekuasaan negara dijalankan dalam penyediaan barang dan jasa publik secara efektif dan efisien, tanpa mengabaikan nilai-nilai demokrasi. Dalam kerangka ini, pemerintah tidak diposisikan sebagai satu-satunya aktor dominan, melainkan sebagai bagian dari suatu sistem yang melibatkan pengelolaan pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan dipandang sebagai proses yang berlangsung dari, oleh, dan untuk rakyat, yang menuntut adanya relasi yang seimbang dan sinergis antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Lebih lanjut, dalam konteks pelayanan publik, praktik *good governance* tercermin melalui penerapan prinsip-prinsip utama seperti akuntabilitas aparatur dalam setiap kebijakan dan tindakan, transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan terhadap kritik serta partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum yang menjamin kepastian hukum serta rasa keadilan bagi warga negara.

Menurut Rahman (2023) *good governance* merupakan landasan dalam pembangunan suatu negara. Tata kelola sendiri dapat dipahami sebagai metode penggunaan kekuasaan dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial demi kemajuan bangsa. Sementara itu, tata kelola yang baik merepresentasikan sistem pemerintahan ideal yang dicirikan oleh beberapa prinsip fundamental yaitu partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi, penegakan supremasi hukum, efektivitas dan efisiensi, daya tanggap, serta pemerataan dan inklusivitas. *Good governance* berpusat pada bagaimana kekuasaan dan otoritas negara dimanfaatkan secara optimal untuk menyelesaikan beragam permasalahan publik. Ia mendorong terciptanya kebijakan yang prediktif dan terbuka, birokrasi yang profesional, serta menguatnya masyarakat sipil yang aktif dalam urusan negara. Selain itu, *good governance* juga menjamin struktur demokrasi yang kokoh, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan kebebasan pers, yang

semuanya esensial bagi terwujudnya pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

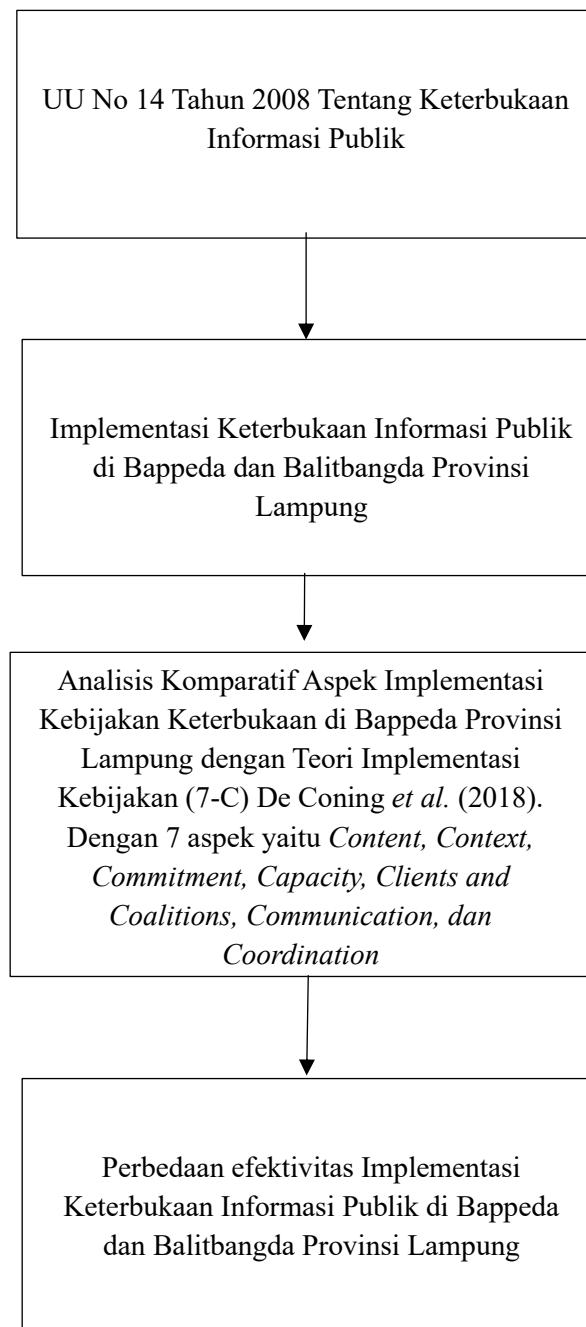
United Nation Development Program (UNDP) mengidentifikasi beberapa karakteristik utama dari *good governance*, yang meliputi:

1. Partisipasi (*Participation*)
2. Supremasi Hukum (*Rule of Law*)
3. Transparansi (*Transparency*)
4. Daya Tanggap (*Responsiveness*)
5. Orientasi Konsensus (*Consensus Orientation*)
6. Kesetaraan (*Equity*)
7. Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*)
8. Akuntabilitas (*Accountability*)
9. Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik merupakan konsep dalam penyelenggaraan negara yaitu cara menyeluruh bagaimana kekuasaan dan otoritas negara dimanfaatkan. Tujuannya jelas untuk menciptakan kesejahteraan bersama dan menyelesaikan berbagai masalah publik dengan cara yang optimal, berintegritas, dan bertanggung jawab. Pendekatan ini menuntut agar seluruh alur pemerintahan beroperasi dengan efisien dan efektif, di mana setiap keputusan dan tindakan diambil secara transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. *Good governance* juga sangat menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan proses kebijakan, serta menjamin penegakan supremasi hukum yang adil dan konsisten.

2.4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan representasi konseptual yang memberikan gambaran jelas tentang masalah-masalah utama yang akan dibahas dalam sebuah penelitian. Kerangka pikir ini juga sangat membantu peneliti untuk mencari dan merumuskan masalah, menentukan apa yang ingin dicapai dari penelitiannya, serta merencanakan langkah-langkah yang diperlukan agar tujuan tersebut bisa terwujud. Berikut akan ditampilkan gambaran alur berpikir yang akan diikuti selama penelitian ini berlangsung.



Gambar 5. Kerangka Pikir

III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan metode penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini menjadi beberapa bagian yang mencakup Jenis penelitian, Lokasi penelitian, Fokus penelitian, Sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, serta Teknik keabsahan data. Pembahasan detail pada setiap bagian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai langkah-langkah sistematis yang ditempuh dalam penelitian ini.

3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu menjelajahi dan mendalami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terkait isu-isu sosial atau kemanusiaan. Prosesnya melibatkan pertanyaan serta prosedur yang bersifat adaptif, dengan data yang lazimnya dikumpulkan langsung dari konteks partisipan. Peneliti yang terlibat dalam jenis penelitian ini menerapkan pendekatan induktif, membangun pemahaman dari data hingga menghasilkan tema, dengan fokus utama pada perspektif individual dan menekankan pentingnya menggambarkan kompleksitas suatu situasi secara menyeluruh (Creswell, 2023).

Jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Pendekatan ini memberikan peluang bagi peneliti untuk memahami realitas sosial secara komprehensif dengan memotret kondisi objek penelitian sebagaimana adanya di lapangan. Pemilihan metode ini didasarkan pada kemampuan dalam memfasilitasi interaksi langsung dengan informan sehingga data yang diperoleh bersifat faktual dan kontekstual. Jenis pendekatan ini peneliti menggali makna serta pengalaman individu maupun kelompok secara mendalam, mendeskripsikan suatu fenomena secara rinci, sekaligus menilai sejauh mana efektivitas suatu program atau kebijakan berjalan. Berbagai keunggulan tersebut membantu peneliti dalam menelaah dan menganalisis proses implementasi kebijakan

keterbukaan informasi publik di Bappeda dan Balitbangda Provinsi Lampung secara lebih mendalam dan menyeluruh.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini mengadopsi teori implementasi 7-C untuk implementasi kebijakan, yang dikembangkan oleh De Coning *et al.*, (2018) untuk membandingkan bagaimana implementasi KIP di Bappeda dan Balitbangda Provinsi Lampung.

Pendekatan analisis ini akan berpusat pada tujuh aspek yang akan memengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yaitu:

a) *Content* (Isi Kebijakan)

Memahami perumusan kebijakan keterbukaan informasi publik di Bappeda dan Balitbangda Provinsi Lampung, meliputi kejelasan tujuan, strategi, dan prosedur dalam regulasi, serta jenis informasi yang akan disampaikan.

b) *Context* (Konteks)

Menganalisis kondisi dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi di Bappeda dan Balitbangda Provinsi Lampung.

c) *Commitment* (Komitmen)

Menelaah tingkat keseriusan dan dukungan dari berbagai tingkatan aparatur di Bappeda dan Balitbangda Provinsi Lampung, mulai dari pimpinan hingga staf pelaksana, dalam menjalankan prinsip dan praktik keterbukaan informasi publik.

d) *Capacity* (Kapasitas)

Mengidentifikasi ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya seperti sarana digital (*website*, PPID), dana, SDM terampil, dan sistem IT untuk mendukung keterbukaan informasi di Bappeda dan Balitbangda Provinsi Lampung.

e) *Clients & Coalitions* (Klien dan Koalisi)

Menganalisis peran masyarakat sebagai penerima informasi (klien) serta kelompok-kelompok kepentingan atau lembaga lain (koalisi) yang mendukung atau memengaruhi implementasi keterbukaan informasi publik di Bappeda dan Balitbangda Provinsi Lampung.

f) *Communication* (Komunikasi)

Memahami bagaimana informasi terkait kebijakan keterbukaan informasi publik disampaikan secara efektif. Ini mencakup kejelasan pesan, saluran komunikasi yang

digunakan (baik internal maupun kepada publik), serta seberapa baik informasi diterima dan dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan.

g) *Coordination* (Koordinasi)

Menganalisis bagaimana berbagai bagian di dalam Bappeda dan Balitbangda Provinsi Lampung, atau dengan instansi lain dalam bekerja sama dan menyelaraskan upaya mereka dalam menjalankan kebijakan keterbukaan informasi publik.

h) Aspek yang menyebabkan hasil yang berbeda dalam implementasi kebijakan KIP antara Bappeda Provinsi Lampung dengan Balitbangda Provinsi Lampung.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan akademis yang relevan dengan fokus studi Ilmu Administrasi Negara. Bappeda menduduki posisi strategis sebagai otoritas perencana pembangunan daerah, yang mencakup perumusan, implementasi, hingga evaluasi program pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat. Dalam konteks Ilmu Administrasi Negara, Bappeda merupakan tempat yang tepat untuk mempelajari tata kelola pemerintahan, akuntabilitas, dan transparansi kebijakan.

Pemilihan Balitbangda sebagai lokasi pembandingan juga memiliki dasar akademik yang kuat. OPD ini bertugas membantu Gubernur dalam bidang penelitian dan pengembangan daerah menjadikannya penting dalam proses perumusan kebijakan. Balitbangda bertanggung jawab atas penelitian, pengkajian, dan evaluasi kebijakan, yang semuanya bertujuan mendukung pembangunan daerah. Ini berarti Balitbangda menghasilkan dan mengelola informasi penting yang seharusnya menjadi hak publik untuk diakses, seperti data penelitian dan hasil evaluasi program. Jika Bappeda menjadi contoh dari sebuah keberhasilan, Balitbangda menjadi pembandingan untuk memahami faktor-faktor yang menghambat capaian optimal dalam konteks yang sama.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Menurut Creswell (2023) dalam penelitian kualitatif, sumber data dibagi menjadi dua jenis utama:

a. Data primer

Data ini diperoleh secara langsung oleh peneliti mengenai Implementasi KIP. Dengan demikian, sifat data ini faktual karena berasal langsung dari tangan pertama (peneliti). Dalam penelitian ini, data primer peneliti peroleh melalui observasi langsung di Bappeda dan Balitbangda Provinsi Lampung, di mana peneliti mengamati implementasi keterbukaan informasi publik yang berjalan. Selain itu, peneliti juga mendapatkan data primer dari wawancara mendalam dengan pihak-pihak di Bappeda Provinsi Lampung antara lain Sekretaris PPID Pembantu, staf pengelola data, dan perwakilan masyarakat sipil dan pihak-pihak di Balitbangda Provinsi Lampung antara lain PPID pelaksana, staff bidang pelayanan dan dokumentasi informasi, staff bidang pengelolaan data dan pengelolaan *website* dan masyarakat yang pernah mengakses informasi publik di Balitbangda Provinsi Lampung. Hasil dari proses ini berupa catatan lapangan, rekaman audio wawancara, dan foto-foto pendukung.

b. Data Sekunder

Data ini didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh bersumber dari dokumen yang relevan dengan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Bappeda dan Balitbangda Provinsi Lampung. Peneliti juga akan memanfaatkan informasi dari *website* resmi Bappeda (<https://Bappeda.lampungprov.go.id/>) dan Balitbangda Provinsi Lampung (<https://Balitbangda.lampungprov.go.id/>) dan publikasi media massa yang relevan dengan berbagai informasi dan data yang dapat dikaitkan dengan topik penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang akurat dalam penelitian, menurut Creswell (2023), peran peneliti sangat penting dalam mengantisipasi masalah yang mungkin muncul. Proses pengumpulan data ini umumnya meliputi kegiatan membatasi ruang lingkup penelitian, lalu mengumpulkan berbagai informasi melalui pengamatan langsung wawancara baik yang terencana maupun lebih bebas, mengkaji dokumen, melihat

materi visual, serta merancang cara khusus untuk mencatat atau merekam informasi secara efisien di lokasi penelitian.

Dalam penelitian ini, ada tiga cara utama yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data:

a) Observasi

Yaitu metode sistematis dalam mengumpulkan data yang mencakup pembahasan dan penelaahan terhadap persoalan spesifik yang telah ditetapkan sebelumnya. Peneliti melakukan pengamatan langsung observasi di Bappeda dan Balitbangda Provinsi Lampung untuk melihat praktik nyata terkait kebijakan keterbukaan informasi publik. Pengamatan ini meliputi ketersediaan fasilitas dan media informasi publik seperti papan pengumuman, loket layanan, serta kelengkapan dan kemudahan dalam mengakses situs web resmi Bappeda (<https://Bappeda.lampungprov.go.id/>), Balitbangda Provinsi Lampung (<https://Balitbangda.lampungprov.go.id/>) dan media sosial mereka. Peneliti juga mengamati proses pelayanan informasi publik, termasuk alur permintaan dan kecepatan respons. Selain itu, peneliti melihat bagaimana Bappeda dan Balitbangda mempublikasikan informasi secara proaktif.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara menjadi metode pengumpulan data utama, di mana peneliti berbicara langsung dengan narasumber untuk bertukar informasi dan ide, serta mendapatkan pandangan, opini, dan pemahaman mendalam mereka tentang topik yang dibahas. Narasumber yang diwawancarai meliputi Sekretaris PPID Bappeda Provinsi Lampung untuk memahami kebijakan dan strategi umum, Bidang Pendukung Sekretariat PPID Bappeda Provinsi Lampung untuk mendalami mekanisme pelayanan informasi, tantangan, dan inovasi, staf pelaksana PPID, divisi terkait pengelolaan data dan publikasi informasi untuk memahami proses internal, serta perwakilan masyarakat yang pernah menggunakan layanan informasi publik di Bappeda Provinsi Lampung untuk mendapatkan perspektif pengguna. Kemudian di Balitbangda narasumber yang akan diwawancarai meliputi PPID pelaksana, staff bidang pelayanan dan dokumentasi informasi, staff bidang pengelolaan data dan pengelolaan *website* dan masyarakat yang pernah mengakses informasi publik di Balitbangda Provinsi Lampung.

Pelaksanaan wawancara dilakukan secara bertahap dengan memadukan metode *offline* dan *online*. Pada Balitbangda Provinsi Lampung, wawancara dengan pihak internal dilaksanakan secara *offline* pada 30 September 2025. Selanjutnya, wawancara dengan masyarakat yang pernah mengakses informasi publik di Balitbangda dilaksanakan secara *online* pada 8–9 Oktober 2025. Adapun di Bappeda Provinsi Lampung, wawancara dengan pihak internal juga dilakukan secara *offline* pada 6 Oktober 2025, Fokus wawancara mencakup kebijakan umum, tindakan pemerintah dalam implementasi KIP, serta inovasi dalam pelayanan informasi publik. Sementara itu, wawancara dengan masyarakat pemohon informasi publik di Bappeda dilaksanakan secara *online* pada 9–10 Oktober 2025.

Dalam penelitian kualitatif ini, penentuan jumlah informan mengikuti panduan dari John W. Creswell (2023) yang menyarankan 20 informan sebagai jumlah ideal dalam studi kasus yang mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini melibatkan total 20 informan yang terbagi dalam dua kelompok utama. Kelompok pertama berasal dari internal Bappeda Provinsi Lampung terdiri dari pejabat yang berwenang dalam pengelolaan informasi publik, seperti Ketua dan Sekretaris PPID, pejabat pembantu PPID dari bidang teknis, staf pengelola data, serta koordinator pelayanan informasi dan internal Balitbangda Provinsi Lampung yaitu PPID pelaksana, staff bidang pelayanan dan dokumentasi informasi, staff bidang pengelolaan data dan pengelolaan *website*. Kelompok kedua meliputi pengguna dan pemohon informasi publik di Bappeda dan Balitbangda Provinsi Lampung yang dipilih berdasarkan data permohonan layanan informasi pada laporan PPID Tahun 2024. Komposisi ini dirancang untuk memberikan pandangan menyeluruh mengenai implementasi keterbukaan informasi publik, baik dari sisi penyedia layanan maupun pihak yang mengaksesnya, sehingga dapat mendukung analisis yang komprehensif dan sesuai dengan pendekatan studi kasus kualitatif yang dianjurkan Creswell. Berikut adalah tabel data informan pada penelitian ini:

Tabel 3. Data Informan Penelitian Bappeda Provinsi Lampung

No	Jabatan	Informasi yang didapatkan
1.	Sekretaris PPID	Pemahaman regulasi (UU KIP, dan aturan internal Bappeda), komitmen pimpinan dan organisasi, serta kapasitas Bappeda (SDM, infrastruktur, anggaran, dan kendala). Fokus lainnya adalah strategi dan hambatan yang memengaruhi implementasi KIP dan Informasi lebih detail mengenai alokasi SDM, pelatihan, dan anggaran riil untuk KIP, mekanisme komunikasi

No	Jabatan	Informasi yang didapatkan
		operasional, prosedur layanan, pengelolaan data dan koordinasi harian antar unit teknis yang menyediakan data.
2.	Koordinator Bidang Pendukung Sekretariat PPID	Pemahaman tentang informasi diberikan, saluran yang digunakan, tingkat kemudahan akses, jenis pertanyaan yang sering muncul, feedback dari pemohon, kendala dalam melayani dan jenis dan proses penyediaan informasi publik yang dihasilkan oleh masing-masing bidang ke PPID. Akan dilihat pula koordinasi bidang tersebut dengan PPID dalam proses pengumpulan data. Fokus lain adalah tingkat komitmen di level bidang dalam mendukung KIP, serta ketersediaan sumber daya manusia (SDM) di bidang tersebut untuk mengelola dan menyiapkan informasi publik yang relevan.
3.	Staf Pelaksana PPID Bappeda Provinsi Lampung (2 Orang)	Detail proses penerimaan dan penanganan permohonan informasi, kendala operasional yang sering dihadapi dalam memberikan pelayanan, bagaimana mereka berkoordinasi dengan pejabat pembantu PPID di bidang teknis untuk memperoleh data, serta pengalaman dalam menggunakan sistem pengelolaan informasi.
4.	Pemohon Informasi Publik (Masyarakat)	Memahami implementasi KIP dari perspektif pengguna dilakukan untuk menggali pengalaman mereka dalam mengajukan permohonan informasi ke Bappeda, terhadap keterbukaan dan responsivitas Bappeda dalam pemenuhan hak atas informasi publik.

Tabel 4. Data Informan Penelitian Balitbangda Provinsi Lampung

No	Jabatan	Informasi yang ingin didapatkan
1.	PPID pelaksana	Pemahaman mengenai regulasi, komitmen pimpinan dan organisasi di Balitbangda, serta kapasitas SDM, infrastruktur, dan anggaran yang dialokasikan untuk KIP. Fokus utama adalah kendala dan hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan.
2.	Staf bidang pelayanan dan dokumentasi informasi	Informasi detail mengenai alokasi SDM, pelatihan, dan anggaran riil untuk KIP. Peneliti akan menelusuri kendala komunikasi operasional, prosedur layanan, dan pengelolaan data yang menyebabkan keterbatasan informasi di <i>website</i>
3.	Staf bidang pengelolaan data dan pengelolaan <i>website</i>	Informasi mengenai kendala teknis dalam mengelola <i>website</i> , hambatan dalam memperbarui data secara rutin, dan proses koordinasi harian dengan unit teknis lain untuk mendapatkan data yang akurat. Fokus pada mengapa <i>website</i> belum optimal sebagai sarana KIP.

- | | | |
|----|---|---|
| 4. | Masyarakat yang pernah mengakses informasi publik di Balitbangda Provinsi Lampung | Memahami implementasi KIP dari sudut pandang pengguna. Peneliti akan mendapatkan informasi tentang pengalaman mereka mengajukan permohonan ke Bappeda, termasuk kemudahan, respons, kualitas informasi serta persepsi umum mereka terhadap keterbukaan dan responsivitas Bappeda secara keseluruhan dalam memenuhi hak atas informasi publik. |
|----|---|---|

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui berbagai rekaman atau catatan yang sudah ada dari masa lalu. Ini bisa berupa tulisan (seperti koran, laporan, makalah), gambar, foto, atau karya lainnya. Dokumentasi ini sangat berguna sebagai sumber data kualitatif karena bisa menyimpan informasi penting tentang kegiatan, atau perkembangan suatu kondisi sosial. Peneliti akan mengumpulkan data sekunder melalui kajian dokumen dan catatan yang sudah ada. Dokumen-dokumen penting yang akan dianalisis peneliti meliputi peraturan dan kebijakan internal Bappeda dan Balitbangda Provinsi Lampung terkait keterbukaan informasi publik yaitu SOP pelayanan informasi, Laporan Kinerja, Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik, SOP pelayanan publik Bappeda dan Balitbangda Provinsi Lampung Tahun 2024 untuk mengevaluasi kelengkapan informasi yang tersedia. Peneliti juga akan mempelajari Laporan KIP tahun 2024 dan Laporan Tahunan PPID Pembantu Bappeda dan Balitbangda, dan Dokumen IKIP oleh Komisi Informasi Lampung serta Penelusuran mendalam terhadap situs web resmi Bappeda Provinsi Lampung dan Balitbangda Provinsi Lampung akan dilakukan oleh peneliti untuk menilai ketersediaan informasi seperti rencana kerja, program, anggaran, dan laporan. Terakhir, foto-foto akan diambil peneliti sebagai bukti visual selama penelitian.

Tabel 5. Dokumentasi Penelitian Bappeda dan Balitbangda Provinsi Lampung

No	Dokumen	Data yang ingin didapatkan
1.	Standar, Operasional Prosedur, (SOP) Pelayanan Informasi	Dari dokumen ini, peneliti ingin mendapatkan pemahaman detail mengenai alur persyaratan, waktu respons, dan mekanisme, penanganan keberatan dalam proses pelayanan permintaan informasi publik oleh Bappeda dan Balitbangda. Ini juga akan menunjukkan bagaimana Bappeda dan Balitbangda memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan.
2.	Publik (SK penetapan Peraturan dan Kebijakan Internal Bappeda	Dokumen ini akan memberikan informasi mengenai dasar hukum formal penetapan

dan Balitbangda terkait Keterbukaan Informasi PPID)	PPID Pembantu, struktur organisasi PPID, serta tugas dan tanggung jawab yang melekat pada PPID Pembantu dan jajarannya.
3. Laporan Kinerja Bappeda dan Laporan Kinerja Balitbangda Provinsi Lampung Tahun 2024	Peneliti akan mengkaji capaian kinerja Bappeda dan Balitbangda secara umum khususnya indikator yang relevan dengan transparansi akuntabilitas, dan pelayanan publik, sebagai cerminan tidak langsung dari kualitas publikasi informasi kinerja instansi tersebut.
4. Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2024	Dokumen ini adalah sumber utama untuk mendapatkan data tentang kinerja PPID Pembantu Bappeda. Informasi yang dicari meliputi jumlah permohonan informasi jenis, informasi yang paling sering diminta, rata-rata waktu penyelesaian permohonan jumlah keberatan serta evaluasi internal terhadap layanan informasi publik yang telah diberikan
5. Laporan IKIP Tahun 2024 (Dari Komisi Informasi Lampung)	Dokumen ini akan memberikan penilaian eksternal dan komprehensif dari Komisi Informasi Lampung mengenai tingkat keterbukaan informasi Bappeda dan Balitbangda Provinsi Lampung. Peneliti ingin mendapatkan informasi tentang indikator penilaian, hasil evaluasi dan rekomendasi yang diberikan komisi informasi, yang berfungsi sebagai tolok ukur implementasi KIP dari sudut pandang otoritas pengawas.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data kualitatif yang digunakan mengacu pada pendekatan Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang meliputi tiga tahap utama:

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merupakan proses memilih, menyederhanakan, memfokuskan, dan mengubah data dari berbagai sumber, seperti catatan lapangan, wawancara, dokumen, serta data empiris lainnya. Proses ini berlangsung secara berkelanjutan selama penelitian, mulai dari penetapan kerangka konseptual, formulasi pertanyaan penelitian, hingga pengumpulan dan analisis data. Data yang diperoleh disaring dan diatur sedemikian rupa agar memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan yang akurat.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah tahap di mana informasi yang telah dikondensasikan disusun dalam format yang terorganisir dan ringkas, misalnya dalam bentuk matriks atau tabel. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman peneliti terhadap data

sehingga proses analisis dapat berlangsung lebih efisien dan mengurangi risiko penarikan kesimpulan yang tergesa-gesa atau tidak lengkap. Pembuatan tampilan data yang sistematis juga merupakan bagian integral dari analisis itu sendiri.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan dimulai sejak awal proses pengumpulan data dengan mengamati pola-pola, hubungan sebab-akibat, serta makna yang terkandung dalam data. Kesimpulan awal ini bersifat tentatif dan perlu diuji kembali secara mendalam. Verifikasi dapat dilakukan melalui refleksi ulang oleh peneliti, diskusi dengan rekan sejawat, atau pemeriksaan ulang data. Proses ini memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan logis, dapat dipertanggungjawabkan, dan valid.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan atau kebenaran data dalam penelitian, dapat menggunakan metode triangulasi (Creswell, 2023). Triangulasi adalah cara untuk mengecek ulang keakuratan data dari berbagai sudut pandang, baik itu sumber informasinya, cara pengumpulan datanya, orang yang mewawancarai, narasumbernya, atau bahkan teori yang digunakan. Menurut Creswell (2023), ada tiga jenis utama triangulasi data yaitu:

a) Triangulasi Sumber

Ini adalah cara untuk mengecek informasi dengan membandingkan data yang didapat dari berbagai sumber berbeda untuk topik yang sama. Misalnya, kita bisa mengonfirmasi suatu informasi dari hasil wawancara, lalu mengeceknya lagi dari dokumen, catatan di lapangan, foto, atau video.

b) Triangulasi Metode atau Teknik

Ini dilakukan dengan mengecek data yang sama, tetapi menggunakan cara atau teknik pengumpulan yang berbeda kepada sumber yang sama. Contohnya, setelah wawancara, kita bisa menggunakan observasi atau kuesioner untuk mengonfirmasi informasi yang sama dari narasumber yang serupa.

c) Triangulasi Waktu

Ini berarti mengecek data atau informasi dengan melakukan pengumpulan data di waktu atau periode yang berbeda. Penting untuk diperhatikan bahwa hasil penelitian bisa saja berbeda jika dilakukan pada waktu yang berbeda.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menerapkan triangulasi sumber. Dengan demikian peneliti mengumpulkan dan membandingkan bukti dari berbagai sumber yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan berbagai informan, observasi langsung terhadap praktik di lapangan, serta analisis dokumen-dokumen relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan keabsahan informasi, mengidentifikasi konsistensi atau perbedaan perspektif, dan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan KIP di Bappeda dan Balitbangda Provinsi Lampung.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang disusun berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Bappeda dan Balitbangda Provinsi Lampung. Bagian kesimpulan memaparkan hasil utama penelitian yang menggambarkan pelaksanaan kebijakan KIP di Bappeda dan Balitbangda Provinsi Lampung beserta aspek apa saja yang memengaruhi keberhasilannya. Selanjutnya, bagian saran disusun sebagai bentuk rekomendasi bagi instansi terkait dan pihak lain yang berkepentingan agar pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik ke depan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Bappeda dan Balitbangda Provinsi Lampung dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Bappeda Provinsi Lampung dan Balitbangda Provinsi Lampung sama-sama telah berjalan, namun tingkat efektivitasnya berbeda. Bappeda menunjukkan implementasi KIP yang lebih optimal, ditandai dengan kelengkapan regulasi, mekanisme pelayanan yang konsisten, pembaruan informasi daring yang rutin, serta responsivitas layanan yang tinggi. Sementara itu di Balitbangda implelementasi KIP berjalan kurang optimal dikarenakan efektivitas implementasi digital masih terbatas terutama dalam pembaruan data, kecepatan respons daring, pemanfaatan media informasi, keterbatasan kemampuan teknis pegawai dalam pengelolaan sistem informasi, serta koordinasi antar bidang yang belum sepenuhnya berjalan optimal.
2. Aspek yang menyebabkan perbedaan Tingkat keberhasilan implementasi kebijakan KIP antara Bappeda dan Balitbangda Provinsi Lampung dipengaruhi oleh perbedaan kapasitas kelembagaan, efektivitas komunikasi, dan kualitas

koordinasi antarunit. Bappeda memiliki struktur dan sistem kerja yang lebih baik, sumber daya manusia yang kompeten, serta dukungan regulatif dan teknologi yang kuat. Sementara itu, Balitbangda masih perlu meningkatkan kemampuan SDM, memperbarui infrastruktur digital, serta memperluas kemitraan eksternal agar pelaksanaan KIP dapat berjalan lebih konsisten, terbuka, dan berkesinambungan.

Penelitian ini juga memiliki keterbatasan. Penelitian ini hanya menggambarkan kondisi implementasi KIP pada periode penelitian, sehingga perubahan yang terjadi setelah penelitian selesai seperti pergantian pejabat, perubahan regulasi, atau penyesuaian struktur organisasi tidak tercakup dalam analisis. Oleh karena itu penelitian selanjutnya dapat memperbarui data dengan memasukkan perkembangan terbaru tersebut untuk melihat apakah terdapat perubahan pola pelaksanaan KIP dibandingkan hasil penelitian ini.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan bagi pihak-pihak terkait.

1. Bagi Bappeda Provinsi Lampung, perlu terus mempertahankan dan memperkuat pelaksanaan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dan memperbaiki hambatan yang masih muncul dalam proses pelayanan, khususnya terkait komunikasi kepada masyarakat terkait tindak lanjut informasi yang diberikan. Bappeda Provinsi Lampung juga perlu memperkuat mekanisme komunikasi kepada masyarakat terkait tindak lanjut permohonan informasi. Berdasarkan temuan penelitian, pemohon informasi belum selalu memperoleh kejelasan mengenai status permohonan setelah informasi diberikan. Oleh karena itu, Bappeda disarankan untuk menetapkan standar komunikasi layanan informasi yang memuat kewajiban pemberian pemberitahuan status permohonan, baik ketika permohonan masih dalam proses, telah dipenuhi, maupun memerlukan tindak lanjut tambahan. Mekanisme ini dapat diwujudkan melalui notifikasi tertulis atau digital yang terintegrasi dengan layanan PPID, sehingga masyarakat memperoleh kepastian dan transparansi proses pelayanan informasi. Dengan mengatasi hambatan komunikasi kepada masyarakat, Bappeda memiliki peluang mempertahankan bahkan meningkatkan posisi sebagai badan publik informatif melalui pelayanan informasi yang semakin cepat, konsisten, dan responsif.

2. Bagi Balitbangda Provinsi Lampung, disarankan untuk meningkatkan implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dengan memprioritaskan secara lebih mendasar dan sistematis, mengingat hasil penelitian menunjukkan masih lemahnya aspek komitmen, kapasitas, komunikasi, dan koordinasi. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah memperkuat komitmen kelembagaan terhadap KIP dengan cara menginternalisasikan kebijakan tersebut ke dalam pembagian tugas dan tanggung jawab pegawai. Balitbangda perlu menetapkan secara tertulis penanggung jawab pengelolaan informasi publik pada setiap bidang, sehingga kewajiban keterbukaan informasi tidak hanya bergantung pada unit atau individu tertentu, tetapi menjadi tanggung jawab bersama yang terstruktur. Dari aspek kapasitas, Balitbangda perlu mengarahkan pemanfaatan sumber daya yang telah tersedia secara lebih strategis untuk mendukung pengelolaan informasi publik. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi teknis pegawai di bidang pengelolaan informasi dan teknologi informasi, serta penataan ulang prioritas penggunaan anggaran agar mendukung pembaruan perangkat dan sistem digital layanan informasi. Pada aspek komunikasi, Balitbangda perlu melakukan perbaikan signifikan terhadap layanan informasi berbasis digital. Website resmi Balitbangda perlu diperbarui secara berkala dengan memuat informasi publik yang lengkap, terkini, serta mudah diakses, disertai pencantuman *contact person* dan mekanisme umpan balik bagi masyarakat. Selain itu, Balitbangda perlu mengembangkan mekanisme komunikasi tindak lanjut permohonan informasi, sehingga masyarakat memperoleh kejelasan mengenai status dan hasil permohonan informasi tanpa harus datang langsung ke kantor. Penguatan komunikasi internal juga perlu dilakukan melalui pertemuan rutin atau forum koordinasi internal yang membahas khusus pelaksanaan KIP, agar pemahaman pegawai terhadap kebijakan ini menjadi lebih merata. Dari aspek koordinasi, Balitbangda juga perlu mengembangkan pola koordinasi lintas bidang yang lebih adaptif dan responsif. Koordinasi antarbidang tidak hanya dilakukan secara formal, tetapi perlu difasilitasi melalui pemanfaatan platform komunikasi berbasis teknologi untuk mempercepat pertukaran data dan mengurangi ketergantungan pada mekanisme manual. Selain itu, Balitbangda perlu memperkuat koordinasi eksternal dengan Diskominfo dan Komisi Informasi melalui pendampingan teknis dan evaluasi berkala, sehingga implementasi KIP dapat diarahkan secara bertahap. Dengan memperbaiki komitmen, kapasitas, komunikasi, dan koordinasi secara simultan, Balitbangda memiliki peluang untuk

meningkatkan kualitas implementasi keterbukaan informasi publik secara berkelanjutan.

3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara lebih mendalam pengaruh kapasitas kelembagaan, komunikasi, dan koordinasi antarunit terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, penelitian longitudinal pada periode waktu yang berbeda juga penting dilakukan untuk melihat dinamika implementasi kebijakan seiring perubahan kepemimpinan, regulasi, dan sistem digital di lingkungan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Brynard, P. (2005). Policy implementation: Lessons for service delivery. *Journal of Public Administration*, 40(si-3), 649–664.
- Burger, W. (2018). Key Variables that Affect Policy Implementation. *Administratio Publica*, 26(2), 65-90
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* SAGE Publications
- Fadila, A., Putera, R. E., & Ariany, R. (2022). Implementation of Public Information Disclosure in Creating *Good governance* at Universitas Andalas. *Jurnal Public Policy*, 8(3), 135-141. DOI: <https://doi.org/10.35308/jpp.v8i3.4911>.
- Fixsen, D. L. (2005). *Implementation research: A synthesis of the literature*. University of South Florida, Louis de la Parte Florida Mental Health Research Institute, The National Implementation Research Network.
- Fowler, L. (2024). Policy Implementation and the Multiple Streams Framework: Key Findings and Future Research Directions. *International Review of Public Policy*, 6(6: 3)<https://doi.org/10.4000/13gfh>.
- Hottenstein, K. N. (2017). Protecting the Teaching and Learning Environment: A Hybrid Model for Human Subject Research Public Policy Implementation. *Journal of Research Administration*, 48(2), 26-36
- Indah, T., & Hariyanti, P. (2018). Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada dinas kominfo kota tasikmalaya. *Jurnal Komunikasi*, 12(2), 127-140. DOI:
- Ivana, N. Y. N., & Kurniawan, B. (2022). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan. *Publika*, 995-1008. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n3.p995-1008>.
- Khatami, Hamami Aulia (2023) *Implementasi kebijakan keterbukaan informasi public di Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal*. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Knill, C., Steinebach, Y., & Zink, D. (2024). How policy growth affects policy implementation: bureaucratic overload and policy triage. *Journal of European Public Policy*, 31(2), 324-351 <https://doi.org/10.1080/13501763.2022.2158208>.
- Laporan pelayanan tahunan informasi publik Bappeda Provinsi Lampung

- Lubis, M., Kusumasari, T. F., & Hakim, L. (2018). The Indonesia Public Information Disclosure Act (UU-KIP): Its Challenges and Responses. *International Journal of Electrical & Computer Engineering* (2088-8708), 8(1)
- Muhamad, R., Abdullah, Z., Latip, A. R. A., Saat, S. A., & Bakar, N. A. (2023). Community Satisfaction Towards Political Representatives: Explaining The Role Of *Good governance* Practices. *Planning Malaysia*, 21 DOI: <https://doi.org/10.21837/pm.v21i30.1413>.
- Mujiburrahman, M., Suryadi, B., & Budhi, S. (2019). Public Information Disclosure Policy Implementation in Department Of Information and Communication Coding In North Barito District, Central Kalimantan Province, Indonesia. *European Journal of Political Science Studie* DOI: <http://dx.doi.org/10.46827/ejpss.v0i0.6>.
- Nababan, S. (2020). Strategi pelayanan informasi untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik. *Jurnal Ilmu Komunikasi UPNYK*, 17(2), 166-180.
- Najam, A. 1995. Learning from the literature on policy implementation: A synthesis perspective. *International Institute for Applied Systems Analysis*.
- Molobela, T. T. (2019). The assessment of the 7C protocols for policy Implementation in improving service delivery in South African municipalities. *International Conference on Public Administration and Development Alternative (IPADA)*.
- Mintzberg, H. 1979. *The structuring of organization*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall
- Prabowo, R. D., Manar, D. G., & Adhi, S. (2024). Implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik dalam upaya mewujudkan *good governance* (kajian tiga badan publik: Bappeda, Dpkad Dan Dinas Pendidikan Kota Semarang). *Journal of Politic and Government Studies*, 3(3), 187-195.
- Rahman, Z. (2023). A Critical Analysis of *Good governance* and Enough *Good governance* in Bangladesh. vol, 8, 204-216.
- Riski, R. (2025). Public Sector Governance in Local Governments: Challenges and Opportunities in West Pasaman Regency. *Agile Governance and Innovation Measurement Journal*, 2(1), 1-14. DOI: <https://doi.org/10.18196/agimjournal.v2i1.16>.
- Robinson, D., Hewitt, T. and Harris J. 2000. Why inter-organisational relationships In Robinson *et al.* (Eds.). *Managing development: understanding organizational relationships*.
- Rondinelli, D.A. Policy and management requirements for privatization. *Business Forum*, 19(2):5-20.
- Segovia, S.C. & Ramos, M.Z. 2018. Capacities for public policy implementation.
- Septina, A. D., Rianti, A., Iqbal, M., Sihombing, V. S., & Rahmayanti, A. Z. (2025). IMPLEMENTATION ANALYSIS OF PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE POLICY: A CASE STUDY OF THE FOREST MANAGEMENT TECHNICAL PERSONEL INFORMATION SYSTEM (THE SIGANISHUT). *Indonesian Journal of Forestry Research*, 12(1), 99-114. DOI: <https://doi.org/10.59465/ijfr.2025.12.1.99-114>.
- Simatupang, P., & Akib, H. (2021). Efektivitas implementasi dan dampak kebijakan dalam konteks desentralisasi pemerintahan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 2(1).

- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25-36. DOI: <https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.242>
- Tawai, A. (2020). The Role of E-Government Analysis in Supporting Public Trust and Information Disclosure in the City Of Kendari. *Dia: Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 112-120.
- Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008.
- Van Meter, D.S. and Van Horn, C.E. 1975. Policy Implementation Process. *Administration and Society*. 6(4):445–488
- Warwick. D.P. 1982. *Bitter Pills: Population Policies and their Implementation in Eight Developing Countries*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wibawa, K. C. S. (2019). Urgensi keterbukaan informasi dalam pelayanan publik sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 218-234. DOI: <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.218-234>.
- Widanti, N. P. T. (2022). Konsep good governance dalam perspektif pelayanan publik: Sebuah tinjauan literatur. *Jurnal Abdimas Peradaban*, 3(1), 73-85.
- Wunderlich, D. 2012. Europeanization through the grapevine: communication gaps and the role of international organizations in implementation networks of EU External Migration Policy. *Journal of European Integration*.
- Yuono, C. (2023). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 6(2), 418-431. DOI: <https://doi.org/10.32509/pustakom.v6i2.3287>
- Zabidi, N., Ismail, M. M., Adnan, Z. H., & Zain, M. I. M. (2024). *Good governance Practices for Sustainable Development in the Public Sector Services in Malaysia*. *Akademika*, 94(2), 252-266 DOI: <https://doi.org/10.17576/akad-2024-940>.